



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT



KUA

TAHUN ANGGARAN

2023

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 17 TAHUN 2022
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022**

T E N T A N G

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **AKMAL MALIK**
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Bertindak selaku dan atas nama **Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

2. a. N a m a : **Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE., M.Si.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- b. N a m a : **USMAN SUHURIAH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- c. N a m a : **H. ABDUL HALIM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- d. N a m a : **H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Mamuju, 18 Agustus 2022

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT

AKMAL MALIK.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Hj. SITTI SURAIDAH SUHARDI, SE, M.Si.
Ketua

USMAN SUHURIAH.
Wakil Ketua,

H. ABDUL HALIM.
Wakil Ketua,


H. ABDUL RAHIM, S.Ag, MH.
Wakil Ketua,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	34
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	34
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	37
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	47
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2023	47
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	55
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	55
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	56
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	59
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	59
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	59
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	60
BAB VIII	
PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 kebijakan Suku Bunga Negara Dunia	9
Tabel 2.2 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021-2022 (% ,yoy)	12
Tabel 2.3 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (% ,yoy)	14
Tabel 2.4 Neraca Pembayaran Indonesia 2021-2022 (Miliar US Dolar)	16
Tabel 2.5 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Jiwa)	26
Tabel 3.1 Realisasi APBN Ke Sulawesi Barat	36
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	38
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	42
Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Pendapatan Triwulan I TA 2022	44
Tabel 3.5 Pagu dan Belanja Triwulan I TA 2022	45
Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Pembiayaan Triwulan I TA 2022	46
Tabel 4.1 Alokasi PAD, Dana Transfer dan Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2018-2022	50
Tabel 4.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2023	54
Tabel 5.1 Realisasi dan Rencana Belanja Tahun 2021-2023	58
Tabel 7.1 Ringkasan Rancangan Struktur APBD TA. 2023	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Sebagaimana amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022, menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjabarkan dokumen perencanaan pembangunan menengah kedalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat, dijabarkan kedalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat yang disusun oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD dibahas dan

disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk kemudian menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat yang disusun bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam rangka penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat;
4. Sebagai instrumen evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mendasari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7);
 29. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 18);
 30. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 39);
 31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9).
 32. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 19).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat ditengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, tahun 2023 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali.

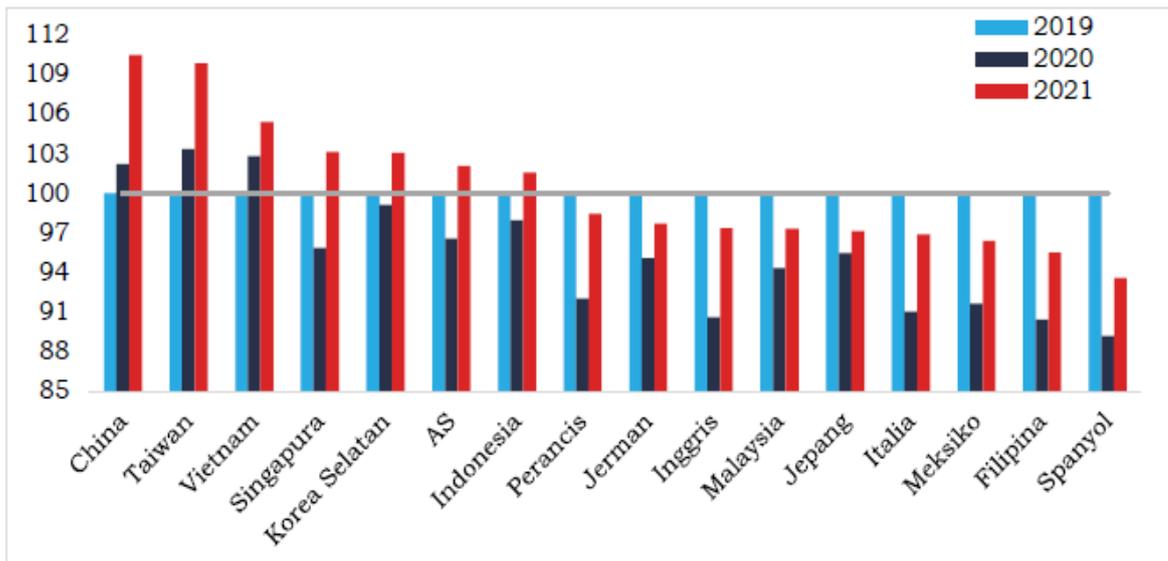
Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023, tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2022 yang terkoreksi cukup tajam akibat pandemi covid-19, proyeksi tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 ditahun 2022 dan upaya kembali menuju ke pertumbuhan normal sebelum pandemi covid-19 yang inklusif dan berdaya saing.

2.1.1. Perkembangan Perekonomian Dunia

Persebaran pandemi Covid-19 hingga Tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. Covid-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada Tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tercermin dari level PDB riil yang telah melampaui level pra-pandemi. Pemulihan yang relatif cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai *herd immunity*.

Gambar 2.1.

Indeks PDB Riil Beberapa Negara Tahun 2019–2021 (Indeks, 2019=100)



Sumber: Oxford Economics Februari 2022, Rancangan RKP Tahun 2023

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020, karena didorong oleh permintaan global yang terjadi pada Tahun 2021. Hal ini tercermin dari peningkatan yang tinggi pada *Baltic Dry Index* (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada Tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 10,8 dan 4,7 persen, setelah berkontraksi hingga 5,3 persen pada Tahun 2020. Di sisi lain, *Purchasing Managers Index* (PMI), baik *manufacturing* maupun *services* mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang Tahun 2021.

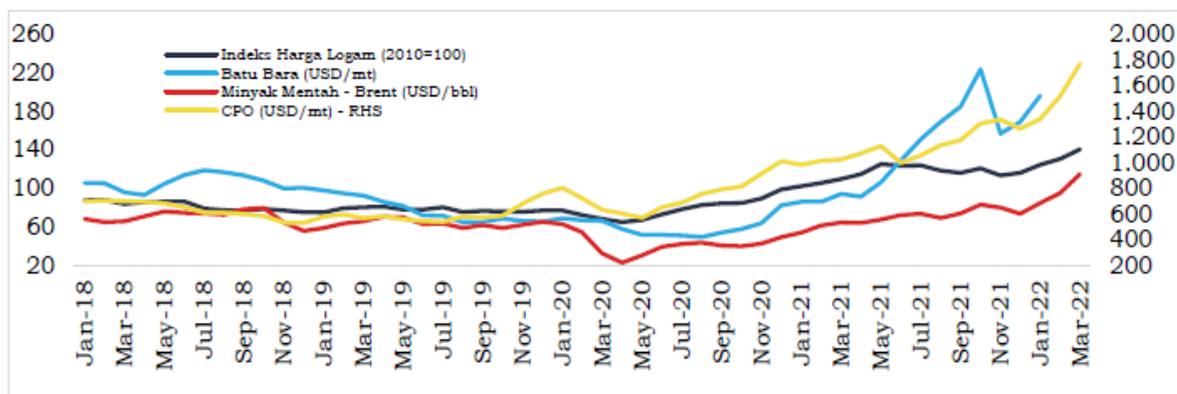
Volatilitas pasar keuangan global pada Tahun 2021 menurun dibandingkan Tahun 2020, tercermin dari penurunan *Chicago Board Option Exchange's Volatility Index* (CBOE VIX Index) yang mendekati level pra-pandemi. Namun pada awal Tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat, terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX Index yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada Tahun 2021 yang tercermin dari peningkatan *Morgan Stanley Capital International All Country World Index* (MSCI ACWI Index). Namun pada awal Tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI Index seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru Covid-19 serta kebijakan pengurangan stimulus yang akan diambil oleh banyak negara.

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada Tahun 2021, sehingga terjadi peningkatan *monetary base* dan likuiditas global. Namun pada Tahun 2022, *monetary base* mulai menunjukkan penurunan, yang dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga pada Maret 2022, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Keputusan The Fed dipicu oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Sementara itu, beberapa bank sentral negara lain seperti Bank of Russia, Bank of England, dan Bank of Korea bahkan telah melakukan normalisasi suku bunga lebih awal didorong pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi.

Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada Tahun 2021. Pemulihan ekonomi global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga *Crude Palm Oil* (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

Gambar 2.2.

Harga Komoditas Internasional

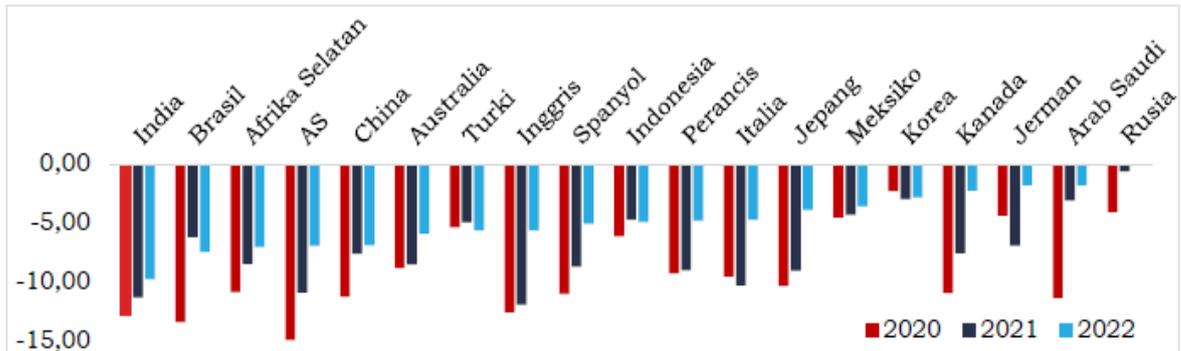


Sumber: World Bank Commodities Price Data 2022, Rancangan RKP Tahun 2023

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada Tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada Tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diperkirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan Covid-19, yang tercermin dari pengurangan defisit fiskal untuk Tahun 2022.

Gambar 2.3.

Defisit Fiskal Negara Dunia 2020–2022 (Persen PDB)



Sumber: IMF Oktober 2021, Kementerian Keuangan 2022, Rancangan RKP Tahun 2023

Dari sisi moneter, pada Tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing* untuk menahan dampak pandemi Covid-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada Tahun 2021 serta optimisme untuk Tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

Tabel 2.1.

Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia

Negara	Februari 2022 (Persen)	Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19
Rusia	20,0	9 kali
Korea Selatan	1,25	3 kali
Inggris	0,75	3 kali
Amerika Serikat (AS)	0,50	1 kali
Jepang	(0,10)	Belum Ada Kenaikan
European Union	0,00	Belum Ada Kenaikan
India	4,00	Belum Ada Kenaikan
Indonesia	3,50	Belum Ada Kenaikan
Filipina	2,50	Belum Ada Kenaikan
Vietnam	2,50	Belum Ada Kenaikan
Cina	2,00	Belum Ada Kenaikan
Malaysia	1,75	Belum Ada Kenaikan

Sumber: CEIC April 2022, Rancangan RKP Tahun 2023

2.1.2. Perkembangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada Tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada Tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp.62,2 Juta atau setara US\$4.349,5 Tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia Tahun 2021 berhasil melampaui level pra-pandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong fenomena terjadinya "*pent up demand*" pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada Tahun 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan Tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada Tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di Tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB Tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut

mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama Tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama Tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada Tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level pra-pandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan Tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Tabel 2.2.
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)

Uraian	2021 ¹⁾		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,0–5,5	5,0–5,5
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	2,0	1,1	5,2–5,4	4,8–5,3	2,6–2,9
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	(2,0)–(1,6)	(0,2)–(0,1)
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	5,4–6,0	1,7–1,9
Ekspor Barang dan Jasa	24,0	4,7	3,9–4,2	11,0–11,6	2,6–2,7
Impor Barang dan Jasa	23,3	(3,4)	4,4–4,6	12,1–12,9	2,3–2,4

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi Tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru Covid-19, *permanent scar* yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada Tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada Tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akumulator, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Tabel 2.3.

Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)

Uraian	2021 ¹⁾		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN ²⁾	Outlook Pertumbuhan ³⁾	Sumber Pertumbuhan ³⁾
Pertumbuhan PDB	3,7	3,7	5,4–5,7	5,0–5,5	5,0–5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	0,2	3,7–3,8	3,6–3,9 ^{h)}	0,5–0,5 ⁿ⁾
Pertambangan dan Penggalian	4,0	0,3	1,9–1,9	2,6–3,5 ^{h)}	0,2–0,3
Industri Pengolahan	3,4	0,7	5,2–5,5	5,3–5,7	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	5,3–5,6 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	0,0	4,3–4,4	5,0–5,4 ^{h)}	0,0–0,0 ⁿ⁾
Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	5,9–6,3 ^{h)}	0,6–0,6 ⁿ⁾
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	4,7–5,1 ^{h)}	0,6–0,7
Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	10,8–13,1 ^{h)}	0,4–0,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	6,3–7,0 ^{h)}	0,2–0,2 ⁿ⁾
Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,3–8,0 ^{h)}	0,5–0,5 ⁿ⁾
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	3,1–3,6 ^{h)}	0,1–0,2
Real Estate	2,8	0,1	5,0–5,0	3,8–4,6 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾
Jasa Perusahaan	0,7	0,0	8,4–8,4	3,8–4,4 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,3)	(0,0)	4,8–5,1	1,7–2,2 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾
Jasa Pendidikan	0,1	0,0	5,2–5,2	2,7–3,5 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	0,1	7,6–8,0	8,0–8,7 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾
Jasa Lainnya	2,1	0,0	9,3–9,5	5,2–5,7 ^{h)}	0,1–0,1 ⁿ⁾

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

Produktivitas merupakan salah satu indikator penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa faktor, di antaranya (a) tenaga kerja, (b) modal, dan (c) Total Factor Productivity (TFP). Ketiga faktor ini saling berkaitan erat, dimana TFP diasumsikan sebagai output sementara input berasal dari tenaga kerja dan modal.

Selama sepuluh tahun terakhir, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia berdasarkan jam bekerja dan jumlah bekerja terus meningkat, dengan nilai masing-masing sebesar 1,35 dan 1,32 pada Tahun 2019. Adapun kondisi ini berbanding terbalik dengan indeks produktivitas modal yang terus menunjukkan tren penurunan. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya, rata-rata

pertumbuhan tahunan indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada level moderat, dan berhasil mengalami peningkatan pada Tahun 2010–2019 setelah sebelumnya sempat menurun pada Tahun 1990–2010.

Secara lebih mendalam, tingkat produktivitas rendah menjadi sebuah permasalahan yang umumnya ditemui oleh negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Tingkat produktivitas rendah ini ditunjukkan oleh data APO, di mana TFP Index Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir dan berada pada tingkat sebesar 0,90 pada tahun 2019. Selanjutnya dibandingkan dengan negara lain, rata-rata tahunan TFP Indonesia tahun 2010–2019 tergolong rendah dan berada pada zona negatif.

Peningkatan produktivitas memiliki peran yang besar bagi Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong TFP, di antaranya (a) perkembangan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi masih terbatas, (b) ekspor high technology terus mengalami penurunan, (c) tenaga kerja berada di sektor bernilai tambah rendah masih dominan, (d) keterlibatan dalam rantai pasok global yang belum berkembang signifikan, dan (e) penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi yang belum optimal.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Tahun 2021 mencatatkan surplus tinggi mencapai US\$13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan oleh surplus neraca transaksi berjalan sebesar US\$3,3 miliar atau 0,3 persen dari PDB. Surplus pada neraca transaksi berjalan tersebut menjadi capaian yang sangat penting sejak surplus terakhir dicapai pada Tahun 2011. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga turut berkontribusi mencatat surplus sebesar US\$11,7 miliar.

Selanjutnya, kinerja transaksi berjalan yang mengalami surplus pada Tahun 2021 didorong oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US\$43,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2020 sebesar US\$28,3 miliar. Kinerja positif neraca barang terakselerasi di tengah fenomena commodity supercycle yang mendorong harga komoditas internasional meningkat. Lebih lanjut, neraca pendapatan sekunder juga berkontribusi positif dengan mencatat surplus sebesar *US\$6,3 miliar*. Adapun kenaikan surplus neraca berjalan lebih jauh masih tertahan oleh meningkatnya defisit neraca jasa–jasa mencapai US\$14,8 miliar, sejalan dengan masih tertekannya neraca jasa perjalanan dan kenaikan defisit jasa transportasi. Selain itu, neraca pendapatan primer juga masih persisten mengalami defisit mencapai *US\$32,0 miliar*, seiring dengan meningkatnya imbal hasil investasi yang masuk ke dalam perekonomian domestik.

Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif sepanjang Tahun 2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung dan investasi portofolio yang masing-masing mencapai *US\$16,5 miliar* dan *US\$5,3 miliar* yang mana capaian keduanya meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020. Positifnya kinerja investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang Tahun 2021 meskipun masih dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun 2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai *US\$144,9 miliar* atau setara dengan pembiayaan 8,0 bulan impor.

Tabel 2.4.
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021–2022 (US\$ Miliar)

Uraian	2021 ¹⁾	Outlook 2022 ²⁾
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	13,5	6,7–7,5
Neraca Transaksi Berjalan	3,3	(4,0)–(6,0)
(% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5)
Neraca Perdagangan Barang	43,8	38,2–38,0
Neraca Perdagangan Jasa	(14,8)	(14,0)–(14,3)
Neraca Pendapatan Primer	(32,0)	(34,7)–(36,2)
Neraca Pendapatan Sekunder	6,3	6,4–6,6
Neraca Modal dan Finansial	11,7	12,0–14,8
Investasi Langsung	16,5	17,7–19,5
Investasi Portofolio	5,3	6,7–8,3
Investasi Lainnya	(10,5)	(12,5)–(13,1)
Posisi Cadangan Devisa	144,9	151,6–152,4
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

NPI Tahun 2022 diperkirakan akan melanjutkan kinerja positif tahun sebelumnya terutama didorong dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 serta semakin tingginya tingkat vaksinasi baik di tingkat global maupun domestik. Selain itu, harga komoditas internasional juga masih akan cukup tinggi meskipun akan sedikit mengalami perlambatan. Lebih lanjut, likuiditas di tingkat global akan cenderung mengalami shock seiring dengan rencana kenaikan suku bunga (*tapering off*) The Fed di tengah meningkatnya inflasi di Amerika Serikat sehingga mendorong aliran investasi keluar dari negara-negara berkembang. Meskipun demikian, dampak dari *tapering off* diperkirakan tidak akan terlalu signifikan dibandingkan pada Tahun 2013 yang lalu karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini yang lebih kuat dan resilien.

Berdasarkan perkiraan perkembangan isu strategis di tingkat global dan domestik, outlook NPI Tahun 2022 akan berkontribusi dalam mendorong

momentum pemulihan ekonomi domestik melalui stabilitas eksternal yang terus menguat. Neraca secara keseluruhan akan berada pada kisaran US\$6,7–7,5 miliar dengan kinerja neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit terbatas sekitar US\$4,0–6,0 miliar atau setara dengan 0,3–0,5 persen dari PDB. Perkembangan neraca barang akan sedikit menurun sebesar US\$38,2–38,0 miliar, seiring dengan fenomena commodity supercycle yang berakhir. Neraca jasa-jasa akan mengalami perbaikan defisit menjadi US\$14,0–14,3 miliar. Sementara neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang menyumbang defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjalan mencapai kisaran US\$34,7–36,2, sejalan dengan meningkatnya imbal hasil investasi di tengah meningkatnya investasi langsung dan investasi portofolio. Adapun neraca pendapatan sekunder akan mengalami peningkatan mencapai sekitar US\$6,4–6,6 miliar.

Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami akselerasi dengan perkiraan mencapai sekitar US\$12,0–14,8 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh investasi langsung yang akan mencapai kisaran US\$17,7–19,5 miliar sejalan dengan target investasi langsung yang terus meningkat serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik dan daya saing nasional. Lebih lanjut, kondisi pasar keuangan yang kondusif dan terus berkembang akan mendorong investasi portofolio pada kisaran US\$6,7–8,3 miliar. Cadangan devisa diperkirakan akan terus berkembang mencapai sekitar US\$151,6–152,4 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 7,5–7,4 bulan.

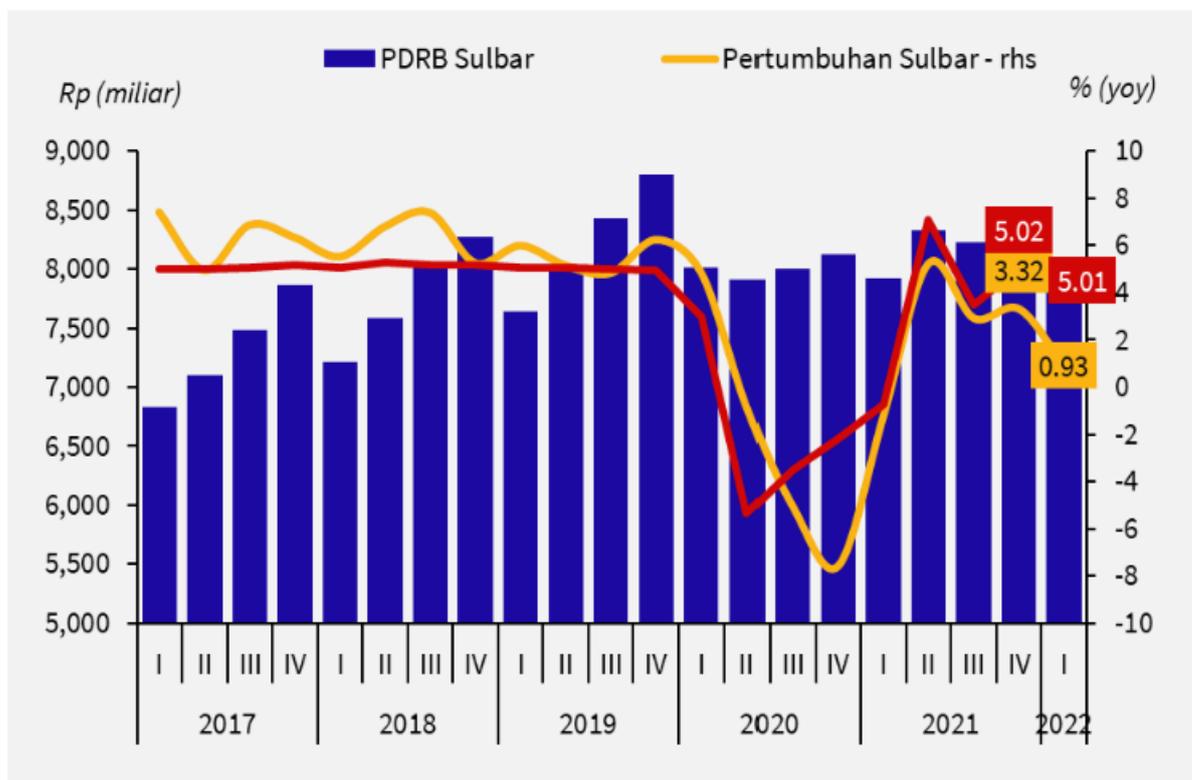
2.1.3. Perkembangan Perekonomian Sulawesi Barat

Perekonomian Sulawesi Barat *tumbuh sebesar 0,93% (yoy) pada Triwulan I 2022* atau lebih rendah dibandingkan Triwulan IV 2021 yang mengalami *pertumbuhan sebesar 3,32% (yoy)*. Berdasarkan komponen pengeluaran, Ekspor luar negeri mengalami kontraksi imbas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terhadap produk CPO yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Investasi mengalami perlambatan pertumbuhan akibat proses pembangunan pascagempa yang mulai berakhir. Meskipun begitu, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan pertumbuhan sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang semakin terkendali. Dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertanian mengalami perbaikan meskipun masih berada di teritori kontraksi didorong oleh peningkatan produksi padi ditengah produksi kelapa sawit yang menurun akibat kendala cuaca dan kenaikan harga pupuk. Sejalan dengan hal tersebut, lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami penurunan akibat penurunan bahan baku kelapa sawit

dan penerapan kebijakan DMO untuk produk CPO dan turunannya oleh pemerintah. Akan tetapi, lapangan usaha perdagangan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Dari perspektif regional, perekonomian kawasan Sulawesi tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,37% (yoy) pada Triwulan I 2022. Seluruh perekonomian provinsi di Pulau Sulawesi tumbuh lebih lambat pada Triwulan I 2022 dibanding Triwulan IV 2022, kecuali Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 2.4.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (Persen, yoy)



Sumber: Laporan Perekonomian, KPw. Bank Indonesia Prov. Sulbar 2022

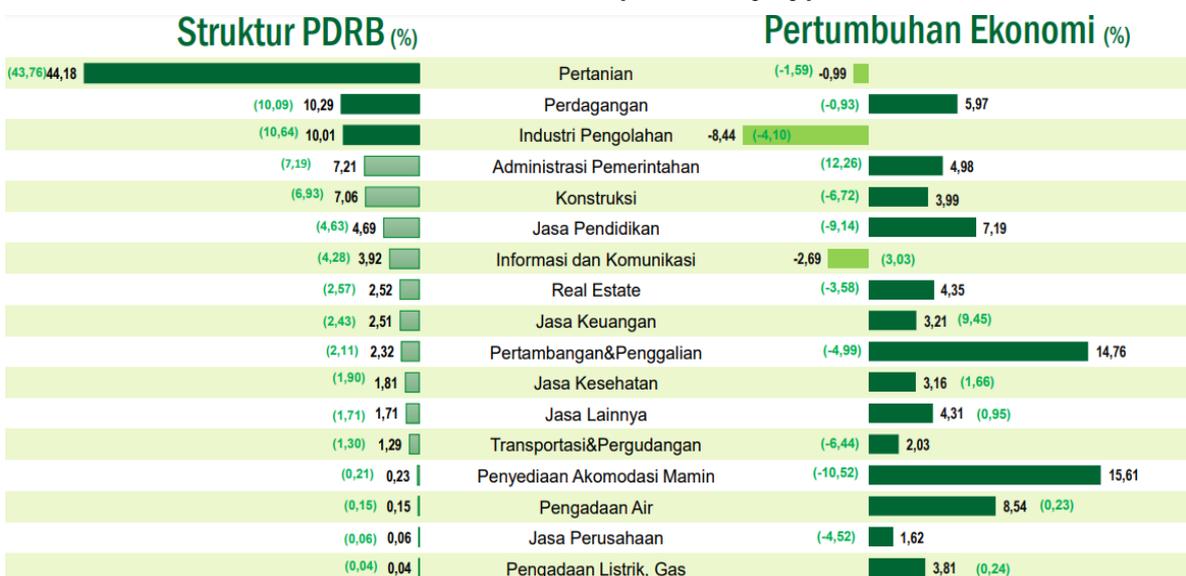
Ekspor luar negeri berkontraksi sebesar 66,57% (yoy) pada Triwulan I 2022 atau lebih dalam dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 yang berkontraksi sebesar 0,74% (yoy). Kemudian, tingkat pertumbuhan sektor investasi juga mengalami perlambatan signifikan dari 17,62% (yoy) pada Triwulan IV 2021 menjadi 3,48% (yoy) pada Triwulan I 2022 seiring dengan kegiatan pembangunan pascagempa yang mulai berakhir. Meskipun begitu, konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 3,41% (yoy) pada Triwulan I 2022 atau lebih tinggi dari Triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 2,50% (yoy). Peningkatan ini sejalan dengan kasus COVID-19 yang semakin menurun dengan tingkat vaksinasi yang semakin meningkat. Perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga pada Triwulan I 2022. Sektor tersebut menjadi pembentuk utama perekonomian Sulawesi Barat

dengan pangsa sebesar 53,05%. Selain itu, terdapat sektor investasi dan dan konsumsi pemerintah yang memiliki pangsa sebesar 26,99% dan 9,66%.

Perekonomian Sulawesi Barat Triwulan I 2022 mencatatkan tingkat pertumbuhan sebesar 0,93% (yoy) atau lebih rendah dibanding pertumbuhan sebesar 3,32% (yoy) yang terjadi pada Triwulan IV 2021. Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan pada lapangan usaha industri pengolahan akibat menurunnya produksi CPO. Lapangan usaha konstruksi juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 27,94% (yoy) pada Triwulan IV 2021 ke 3,99% (yoy) pada Triwulan I 2022 seiring dengan pembangunan pascagempa yang mulai berakhir. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian mengalami perbaikan tingkat pertumbuhan meskipun masih di zona negatif sebesar -0,99% (yoy) atau sedikit lebih tinggi dari Triwulan IV 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar -1,03% (yoy). Hal ini disebabkan oleh kenaikan produksi padi dan ikan di tengah penurunan kelapa sawit sebagai komoditas utama lapangan usaha pertanian. Peningkatan produksi perikanan dan padi ini didorong oleh *base effect* Triwulan I 2021 yang dilanda musibah gempa bumi dan gagal panen. Lapangan usaha perdagangan juga mengalami peningkatan pertumbuhan dari 5,37% (yoy) pada Triwulan IV 2021 menjadi 5,97% (yoy) pada Triwulan I 2022. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan *base effect* Triwulan I 2021 yang mengalami bencana gempa bumi. Kemudian, lapangan usaha administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% (yoy) pada Triwulan I 2022 atau meningkat dari 0,59% (yoy) pada Triwulan IV 2021.

Gambar 2.5.

**Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I 2022 (Persen, yoy)**



Sumber: BPS Prov. Sulbar, 2022

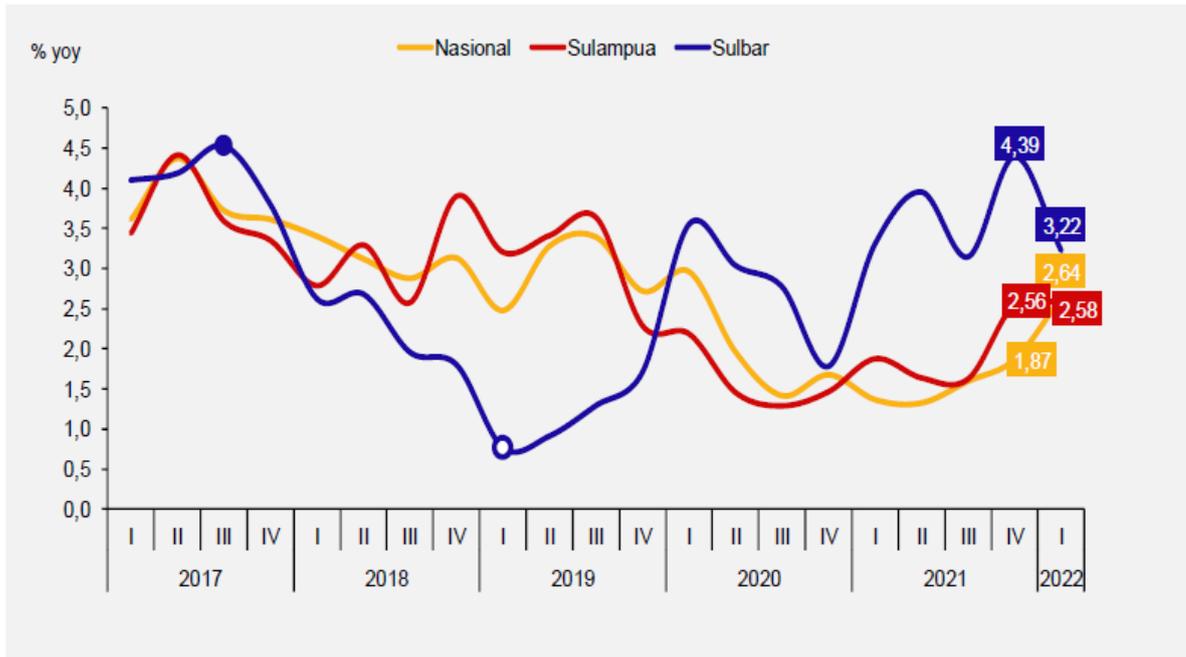
Kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan dan transportasi berdampak besar pada naiknya inflasi Sulawesi Barat di Triwulan I 2022. Kenaikan harga sejumlah komoditas di Sulawesi Barat utamanya disebabkan oleh inflasi minyak goreng, tiket angkutan udara, bawang merah, cabai merah, dan tiket angkutan udara. Harga minyak goreng mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kelangkaan pasokan di pasar, khususnya pasca pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta peningkatan harga CPO global. Untuk komoditas bawang merah dan cabai merah, kenaikan harga dipengaruhi oleh minimnya stok akibat penurunan produksi yang terganggu kondisi cuaca ekstrem dan serangan hama. Kemudian, inflasi komoditas Tiket Angkutan Udara dipengaruhi oleh permintaan yang tinggi seiring dengan pelonggaran syarat bepergian yang diberlakukan Pemerintah. Selain itu, harga tiket pesawat juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi kenaikan harga bahan bakar. Namun di sisi lain, ikan segar mengalami penurunan harga di Triwulan I 2022 akibat stok melimpah yang merupakan kiriman dari luar Kabupaten Mamuju.

2.1.3.1. Inflasi

Capaian inflasi Sulawesi Barat pada Triwulan I 2022 lebih tinggi dibandingkan inflasi kawasan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Realisasi inflasi Sulawesi Barat Triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi kawasan Sulampua dan Nasional yang masing-masing sebesar 2,58% (yoy) dan 2,64% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat menjadi yang tertinggi ketiga di antara provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Namun demikian, Provinsi Sulawesi Barat pada Triwulan I 2022 masih dalam rentang target capaian inflasi Nasional pada kisaran 3 + 1 % pada periode pencatatan.

Gambar 2.6.

Inflasi Sulawesi Barat, Kawasan Sulampua dan Nasional



Sumber: Laporan Perekonomian, KPw. Bank Indonesia Prov. Sulbar 2022

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi kontributor andil terbesar dalam pembentukan IHK Sulawesi Barat pada Triwulan I 2022. Andil inflasi kelompok ini tercatat sebesar 0,99% (yoy) terhadap pembentukan IHK Sulawesi Barat pada Triwulan I 2022. Pencapaian inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode pelaporan tergolong cukup tinggi karena dampak keterbatasan pasokan bahan pangan di pasar, terutama komoditas minyak goreng. Pada sub kelompok tembakau, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai rokok pada awal Tahun 2022 menjadi penyebab kenaikan harga komoditas ini. Hal serupa juga terjadi pada Tahun 2021 ketika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok. Di posisi kedua kelompok yang memiliki andil terbesar dalam pembentukan kenaikan IHK di Sulawesi Barat adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Kelompok ini memiliki andil sebesar 0,89% (yoy) dan nilai inflasi sebesar 4,72% (yoy). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh sub kelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal serta sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,52% (yoy) dan 0,28% (yoy) terhadap pembentukan IHK Sulawesi Barat. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm) serta bahan bangunan semen, besi beton, dan tukang bukan mandor yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,13% (yoy), 0,10% (yoy), dan 0,15% (yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga merupakan dampak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga LPG sementara kenaikan harga

bahan bangunan sejalan dengan harga komoditas global, seperti aluminium, yang merangkak naik.

2.1.3.2. Ketenagakerjaan

Ketersediaan lapangan kerja menurun pada Triwulan I 2022. Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan lalu di Sulawesi Barat berada pada level 78 dimana sebelumnya pada Triwulan IV 2021 mampu mencapai level 102. Kondisi ini mengindikasikan masih belum optimalnya pembukaan kembali lapangan kerja pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di Januari 2021 silam dan kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik namun belum signifikan berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat.

Penghasilan masyarakat di Triwulan I 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu diketahui bahwa indeks penghasilan konsumen berada pada level 97 sedangkan periode sebelumnya pada Triwulan IV 2021 mampu berada pada level 125. Kondisi ini sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang juga menurun. Belum masifnya penyerapan tenaga kerja di lapangan kerja yang tersedia menjadi indikasi penurunan terhadap penghasilan masyarakat.

Ekspektasi ketersediaan lapangan kerja menurun pada Triwulan I 2022. Berdasarkan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan ke depan dibandingkan saat ini diketahui indeks ketersediaan lapangan kerja berada pada level 134 pada Triwulan I 2022 yang jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 lebih baik pada level 153. Penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja ini didukung oleh masih berprosesnya renovasi infrastruktur beberapa lapangan kerja pascagempa dan kondisi bencana banjir yang melanda beberapa lahan pertanian di Sulawesi Barat. Ekspektasi penghasilan masyarakat menurun pada Triwulan I 2022. Sama halnya dengan indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, berdasarkan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan ke depan dibandingkan saat ini indeks penghasilan konsumen pada Triwulan I 2022 berada pada level 143, dimana jika dibandingkan Triwulan IV 2021 memiliki posisi lebih baik pada level 157. Penduduk Usia Kerja (15+) di Sulawesi Barat meningkat pada Februari 2022. Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+) yaitu 1.040,5 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 4,02% (yoy) dari periode Februari 2021 yang berjumlah 1.000,3 ribu jiwa. Kenaikan jumlah penduduk Usia Kerja (15+) tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja di Sulawesi Barat yang menyebabkan penyerapan jumlah Angkatan Kerja mengalami penurunan menjadi 716,9 ribu jiwa pada Februari 2022 atau turun sebesar 0,06% (yoy). Adapun jumlah per masing-masing komponen Penduduk Usia Kerja (15+)

yang merupakan angkatan kerja terdiri atas penduduk Bekerja sebesar 694 ribu jiwa dan pengangguran sebesar 22,3 ribu jiwa.

Tabel 2.5.

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Jiwa)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Feb	Feb						
Penduduk Usia Kerja (15+)	877.4	887.3	908.1	927.2	947.8	967.0	1,000.3	1,040.5
Angkatan Kerja	616.5	641.5	641.8	663.3	669.9	674.0	717.3	716.9
Bekerja	595.9	624.1	622.6	647.0	660.3	656.4	693.8	694.6
Pengangguran	20.6	17.4	19.1	16.3	9.7	17.6	23.5	22.3
Bukan Angkatan Kerja	260.9	245.8	266.3	263.9	277.8	293.0	283.0	323.6
Tingkat Partisipasi Kerja/TPAK (%)	70.27	72.30	70.68	71.53	70.69	69.70	71.71	68.90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.35	2.72	2.98	2.45	1.45	2.61	3.28	3.11

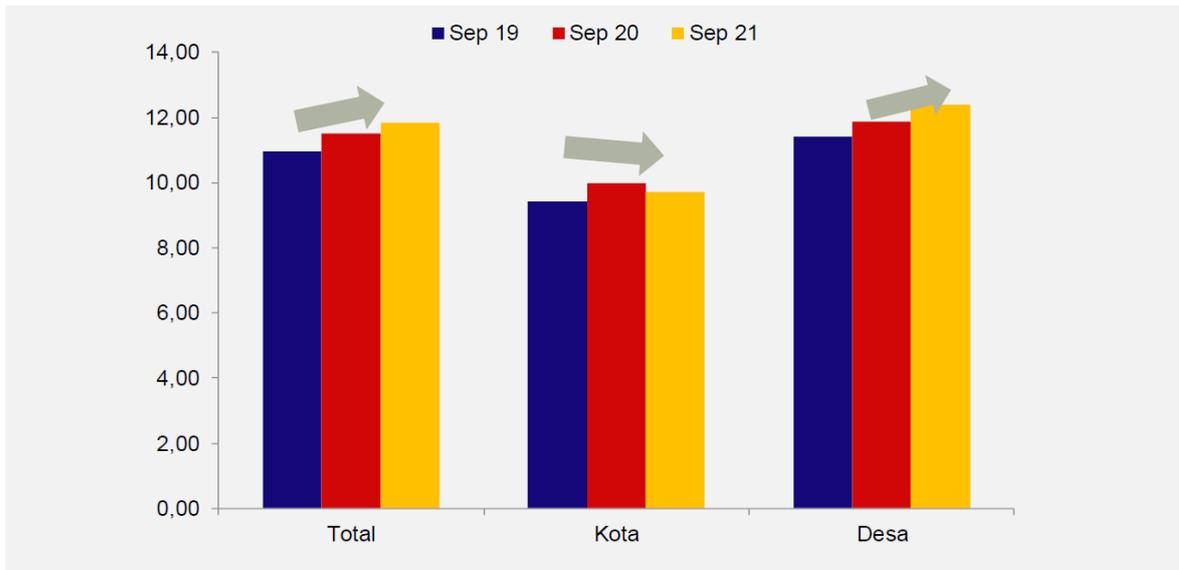
Sumber: Laporan Perekonomian, KPw. Bank Indonesia Prov. Sulbar 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka membaik pada Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 3,11% menurun dari Februari 2021 yang mencapai sebesar 3,28%. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup mencerminkan aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat mengalami perbaikan ditambah dengan kemampuan akselerasi penyerapan penduduk angkatan kerja dilapangan pekerjaan di wilayah Sulawesi Barat. Penyerapan tenaga kerja sektor Jasa Kemasyarakatan meningkat pada Februari 2022. Peningkatan sektor jasa kemasyarakatan secara signifikan meningkat pada Februari 2022 sejumlah 112,6 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021 sejumlah 94,6 ribu jiwa atau mampu tumbuh sebesar 19,02% (yoy). Demikian halnya yang terjadi pada penyerapan sektor industri sejumlah 62,9 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021 yang sejumlah 53,4 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 17,94% (yoy).

2.1.3.3. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan pada September 2021 meningkat secara tahunan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat pada September 2021 mencapai 11,85% jika dibandingkan pada September 2020 sebesar 11,50%. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2021 sebanyak 165,99 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 4,36% jika dibandingkan September 2020 sejumlah 159,05 ribu jiwa. Adapun persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 menurun menjadi 9,72% dari sebelumnya 9,98% pada September 2020. Di sisi lain persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan meningkat pada 12,39% dari sebelumnya 11,89% pada September 2020.

Gambar 2.7.
Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Barat



Sumber: Laporan Perekonomian, KPw. Bank Indonesia Prov. Sulbar 2022

Standar Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan. Garis kemiskinan Sulawesi Barat pada September 2021 berada pada level Rp.384.084/Kapita/Bulan atau naik sebesar 8,84% jika dibandingkan dengan Maret 2021 yang hanya tumbuh sebesar 3,85%. Garis kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah perdesaan pada September 2021 juga memiliki garis kemiskinan yang meningkat pada level Rp.384.598/Kapita/Bulan atau naik sebesar 9,18% dibandingkan periode Maret 2021 yang hanya naik sebesar 3,89%. Sama halnya dengan yang terjadi di wilayah perkotaan pada September 2021 memiliki garis kemiskinan meningkat pada level Rp.382.652/Kapita/Bulan atau meningkat sebesar 7,20% dibandingkan periode Maret 2021 yang naik sebesar 3,92%.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) wilayah perkotaan meningkat. Dilihat berdasarkan wilayah perkotaan besaran GKM pada September 2021 meningkat pada level Rp.299.812/Kapita/Bulan atau meningkat sebesar 7,76% jika dibandingkan dengan Maret 2021 yaitu naik sebesar 3,57%. Sedangkan untuk GKNM juga mengalami peningkatan pada September 2021 berada pada level Rp.82.840/Kapita/Bulan atau naik sebesar 5,22% yang jika dibandingkan dengan Maret 2021 yaitu naik sebesar 5,14%. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) wilayah pedesaan meningkat. Berdasarkan wilayah pedesaan besaran GKM pada September 2021 tumbuh positif pada level Rp.297.024/Kapita/Bulan atau sebesar 9,94% jika dibandingkan dengan Maret 2021 yang hanya tumbuh 3,42%. Sama halnya dengan kondisi GKNM pada September 2021 meningkat berada pada level Rp.87.574/Kapita/Bulan atau sebesar 6,66% yang jika dibandingkan dengan Maret 2021 hanya tumbuh 5,46%.

Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan mengalami kenaikan pada September 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2021 sebesar 1,90 atau naik 0,14 poin dibandingkan Maret 2021. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) September 2021 sebesar 0,50 atau naik 0,06 poin dibandingkan Maret 2021. Naiknya angka P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Naiknya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Sulawesi Barat cenderung semakin menjauh dari Garis Kemiskinan (GK) yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin berjarak utamanya bagi penduduk yang bermukim di pedesaan. Tingkat kemiskinan tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin tetapi juga memperhitungkan permasalahan kemiskinan yang dialami. Untuk itu selain menekan penduduk miskin juga diperlukan strategi memperkecil kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.

2.1.4. Proyeksi Perekonomian Sulawesi Barat

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada Tahun 2023. Setelah mengalami pemulihan kuat pada Tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada Tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada Tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*). Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi,

volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pada Tahun 2022, setelah mengalami *rebound* di Tahun 2021. *International Monetary Fund* (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada Tahun 2022, yang utamanya didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, *World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada Tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di Tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *earnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat base effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami

perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada Tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar Tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diperkirakan lebih rendah pada Tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun lebih rendah dibandingkan Tahun 2021, (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer, (c) harga komoditas yang diperkirakan tidak setinggi di Tahun 2021, dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada Tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

Secara kumulatif, perekonomian Sulawesi Barat Tahun 2022 diproyeksikan tumbuh lebih lambat dibanding Tahun 2021. Produksi kelapa sawit yang mengalami penurunan akibat hambatan ketersediaan pupuk dan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) serta larangan ekspor CPO oleh pemerintah diperkirakan menahan kinerja ekspor Sulawesi Barat. Meskipun begitu, konsumsi masyarakat tumbuh lebih tinggi sejalan dengan peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang semakin terkendali. Kemudian, kinerja investasi akan ditopang oleh konstruksi pengembangan beberapa pelabuhan, termasuk pelabuhan Belang-Belang.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan lapangan usaha pertanian sebagai sektor dengan pangsa terbesar dalam perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan melambat pada Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan produksi kelapa sawit akibat kendala pupuk dan cuaca sebagai produk utama dari sektor tersebut. Lapangan usaha industri pengolahan juga akan terhambat akibat kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan larangan ekspor CPO serta produk turunannya oleh pemerintah. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan tidak akan

tumbuh setinggi tahun sebelumnya akibat pembangunan pascagempa yang mulai berakhir namun akan didorong oleh pembangunan jalan trans Sulawesi serta infrastruktur pelabuhan dan bandara. Di sisi lain, lapangan usaha tersier akan tumbuh lebih baik sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat akibat tingkat vaksinasi Covid-19 yang terus meningkat serta tingkat kasus Covid-19 yang terus menurun. Berdasarkan hal-hal tersebut, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan akan tumbuh pada rentang 1,96-2,46% (yoy) di Tahun 2022.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan prospek perekonomian Sulawesi Barat Tahun 2022. Kondisi perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat pada Tahun 2022 sebagai dampak konflik geopolitik dan berlanjutnya gangguan pasokan berbagai komoditas. Merujuk pada hal tersebut, Bank Dunia merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2022 dari 4,1% (yoy) menjadi 3,2% (yoy). Lebih lanjut lagi, *International Monetary Fund* (IMF) juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 miliknya dari 4,4% (yoy) menjadi 3,6% (yoy). Pertumbuhan ekonomi dua negara mitra perdagangan Sulawesi Barat, yaitu Tiongkok dan India, juga diperkirakan melambat pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2023, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan akan kembali tumbuh positif sebagai bentuk kebangkitan dari degradasi pada masa pandemi Covid-19, konflik geopolitik global, dan bencana gempa bumi. Aktivitas konsumsi diperkirakan akan berjalan lebih baik dan tanpa pembatasan sosial. Pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur akan memberikan dampak positif kepada Sulawesi Barat sebagai daerah yang berbatasan langsung. Namun, isu perubahan iklim secara global berpotensi mengganggu produksi sektor pertanian jika tidak diatasi secara bersama-sama dengan baik.

Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat penurunan pada sisi ekspor luar negeri. Konsumsi rumah tangga Tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Proses vaksinasi COVID-19 yang terus meningkat serta kasus yang terus menurun membuat aktivitas konsumsi masyarakat semakin baik baik. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan konsumsi pada berbagai sektor di Sulawesi Barat. Hal ini juga didukung oleh pemberian bantuan sosial oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Investasi Tahun 2022 diperkirakan diperkirakan tumbuh positif namun tidak setinggi tahun sebelumnya. Pembangunan pascagempa yang mulai berakhir akan membuat pertumbuhan sektor ini tidak semasif Tahun 2021. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur penunjang transportasi serta proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong investasi di Sulawesi

Barat. Konsumsi Pemerintah diproyeksikan tumbuh sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Berkurangnya pembatasan masyarakat seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali akan membuat realisasi anggaran menjadi lebih maksimal ditengah penurunan anggaran belanja pemerintah. Net ekspor pada tahun 2022 diperkirakan berkontraksi Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) serta larangan ekspor CPO dan produk turunannya oleh pemerintah akan membuat ekspor luar negeri Sulawesi Barat yang lebih dari 90% pangsaanya didominasi oleh produk tersebut mengalami penurunan.

Dari sisi penawaran, perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan tumbuh sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan diperkirakan mengalami penurunan di tengah peningkatan lapangan usaha lainnya selama Tahun 2022. Lapangan usaha pertanian diperkirakan terhambat akibat penurunan produksi kelapa sawit. Sebagai produk utama pada lapangan usaha ini, produksi kelapa sawit diperkirakan terhambat akibat kelangkaan dan peningkatan harga pupuk serta gangguan cuaca yang terjadi di awal Tahun 2022 sehingga berdampak terhadap lapangan usaha pertanian. Namun di sisi lain, produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lapangan usaha perdagangan diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Aktivitas pada sektor perdagangan meningkat seiring dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang semakin meningkat dan kasus infeksi yang terus menurun. Momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang tidak dibatasi seperti dua tahun sebelumnya juga akan mendorong perbaikan kinerja pada lapangan usaha ini. Selain itu, kebijakan pembebasan PPnBM untuk pembelian mobil LCGC dan mobil dengan harga di bawah Rp.250 Juta akan mendorong penjualan mobil selama Tahun 2022. Kegiatan konstruksi di Sulawesi Barat diperkirakan tidak semasif tahun sebelumnya. Pembangunan kembali bangunan gedung, rumah, irigasi dan jaringan yang rusak akibat gempa bumi diperkirakan tidak semasif Tahun 2021 sehingga pertumbuhan lapangan usaha konstruksi diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Meskipun begitu, pembangunan pelabuhan perikanan, jalan trans Sulawesi, dan Proyek Strategis Nasional bendungan Budong-Budong akan mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan menurun di Tahun 2022. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan larangan ekspor terhadap produk CPO beserta turunannya berpengaruh negatif terhadap produksi CPO di Sulawesi barat sehingga berdampak terhadap kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

Inflasi Sulawesi Barat Tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari Tahun 2021 dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yaitu $3\% \pm 1\%$. Hal tersebut

seiring dengan pandemi COVID-19 yang diperkirakan semakin terkendali dan dampak gempa bumi yang berangsur pulih. Namun, pengendalian inflasi Sulawesi Barat Tahun 2022 tetap menghadapi beberapa tantangan, antara lain cuaca ekstrem yang mengganggu proses produksi komoditas makanan, terutama ikan segar dan bumbu-bumbuan, serta kebijakan pemerintah yang menaikkan harga LPG non-subsidi, tarif cukai rokok, dan tarif PPN juga akan menjadi pendorong inflasi pada Tahun 2022. Inflasi Sulawesi Barat Tahun 2022 diperkirakan dipicu oleh komoditas minyak goreng akibat peningkatan harga CPO global serta ikan segar dan bumbu-bumbuan yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Cukup banyaknya hasil produksi yang dipasarkan ke luar Sulawesi Barat membuat persediaan komoditas menjadi terbatas. Minimnya infrastruktur produksi dan pergudangan di Sulawesi Barat menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Selain itu, harga minyak global yang mengalami peningkatan akibat konflik Rusia-Ukraina akan berdampak terhadap naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Inflasi Sulawesi Barat Tahun 2023 tetap berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, yaitu $3\pm 1\%$. Harga CPO yang diperkirakan mulai mengalami penurunan pada Tahun 2023 akan mendorong penurunan harga minyak goreng dan produk lain yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit. Rencana pengembangan pelabuhan perikanan oleh pemerintah provinsi akan memperbaiki pola pengelolaan hasil perikanan tangkap sehingga persediaan ikan segar dapat tersedia lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, harga pada beberapa komoditas diperkirakan tetap akan mengalami peningkatan jika konflik geopolitik global terus berlangsung hingga Tahun 2023. Selain itu kenaikan harga juga terjadi pada periode khusus sesuai pola historisnya, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yakni **“Peningkatan Ekonomi dan**

Kesejahteraan Sosial” yang dijabarkan kedalam 4 (Empat) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Prioritas Provinsi I : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan;
- 2) Penguatan Rantai Pasok (Supply Chain) dan Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kelautan;
- 3) Revitalisasi dan Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Perikanan;
- 4) Memperkuat Akses Pangan Masyarakat dan Ketersediaan Pangan Daerah;
- 5) Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM;
- 6) Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran serta Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi;
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi;
- 8) Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha;
- 9) Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu;
- 10) Peningkatan Promosi dan Kerjasama untuk Meningkatkan Peluang Investasi;
- 11) Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing;
- 12) Penguatan Vokasi dalam Kerangka link and match dengan Dunia Usaha dan Industri;
- 13) Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
- 14) Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
- 15) Pengembangan Destinasi Wisata melalui Perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi);
- 16) Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- 17) Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kepariwisata;
- 18) Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 19) Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi;
- 20) Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI).

2. Prioritas Provinsi II: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya

Arah Kebijakan:

- 1) Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan;

- 2) Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan;
 - 4) Peningkatan Partisipasi Sekolah;
 - 5) Penguatan Literasi Sekolah;
 - 6) Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - 7) Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan;
 - 8) Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Menekan AKI dan AKB;
 - 9) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 10) Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat;
 - 11) Intensifikasi Pelaksanaan Germas;
 - 12) Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat;
 - 13) Penurunan Angka Perkawinan Anak;
 - 14) Penguatan Konvergensi Penanganan Stunting;
 - 15) Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat;
 - 16) Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Layak;
 - 17) Peningkatan Akses terhadap Air Bersih yang Layak.
3. Prioritas Provinsi III: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- Arah Kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Udara melalui pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - 2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan, Pesisir dan Laut;
 - 3) Optimalisasi Program Kampung Iklim dan Pengelolaan Limbah;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari;
 - 5) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Pakan Ternak Ramah Lingkungan;
 - 6) Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana;
 - 7) Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana;
 - 8) Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana;
 - 9) Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana
4. Prioritas Provinsi IV: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
- Arah Kebijakan:
- 1) Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 2) Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi berbasis Kinerja dan Data;

- 3) Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat Pemerintahan;
- 4) Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik;
- 5) Penguatan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Publik yang Terpadu dan Terintegrasi;
- 6) Pengembangan dan penerapan Inovasi Pelayanan Publik;
- 7) Peningkatan Pengawasan dan Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berbagai asumsi yang digunakan dalam menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dimana asumsi lebih diarahkan pada sistem yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilepas dari kebijakan dan kondisi ekonomi makro secara nasional. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2023 diperkirakan dapat meningkat dibanding tahun 2022, mengingat pemerintah telah memberikan pelonggaran aktivitas untuk masyarakat ditengah kebijakan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, percepatan perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa Majene-Mamuju 6,2 SR yang terjadi di tahun 2021 mengalami perkembangan dan peningkatan yang lebih baik.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan diseleraskan dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan peningkatan produktivitas, diharapkan mampu menaikkan *output* potensial sehingga *trajectory* ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan. Indonesia perlu memperkuat pondasi ekonomi dan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif agar dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan memperluas kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok dan wilayah.

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” merupakan RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*; (4)

mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan kisaran indikator ekonomi makro Indonesia yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2023, pemerintah menetapkan sejumlah target pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3–5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,0–8,0 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3–6,0 persen, rasio gini 0,375–0,378, indeks pembangunan manusia 73,29 – 73,35, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02, serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani 103-105 dan nilai tukar nelayan 105-107. Sedangkan sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah antara lain Papua 7,3-8,4 persen, Nusa Tenggara 5,1-5,7 persen, Maluku 9,2-10 persen, Sulawesi 7,1-7,8 persen, Kalimantan 5,5-6,0 persen, Sumatera 4,7-5,2 persen, dan Jawa-Bali 5,3-5,8 persen. Selain itu, indikator beserta target dibidang ekonomi yang juga menjadi sasaran pemerintah antara lain: tingkat inflasi sebesar 2,0 hingga 4,0 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34 persen hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia USD 80 hingga USD 100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu hingga 680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari. Namun melihat target pembangunan, pemerintah harus tetap waspada karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis walaupun menunjukkan tren menurun.

3.1.1. Realisasi APBN Sulawesi Barat

Sesuai dengan laporan perekonomian Bank Indonesia Pagu belanja APBN Provinsi Sulawesi Barat 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibelanjakan oleh instansi/lembaga vertikal di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 tercatat sebesar Rp4,96 triliun. Nilai ini berkurang sebesar Rp1,28 triliun dibandingkan dengan pagu belanja APBN Sulawesi Barat tahun 2021 yang bernilai Rp6,24 triliun. Dari pagu yang telah ditentukan tersebut, jumlah realisasi belanja APBN pada triwulan I 2022 mencapai Rp542,31 miliar atau 10.9% dari total pagu. Realisasi tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sekitar 13,2. Berikut (Tabel 3.1) realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sulawesi Barat :

Tabel 3.1. Realisasi APBN Ke Sulawesi Barat

Uraian	Anggaran 2019	Tw I 2019	% Real. Tw I 2019	Anggaran 2020	Tw I 2020	% Real. Tw I 2020	Anggaran 2021	Tw I 2021	% Real. Tw I 2021	Anggaran 2021	Tw I 2021	% Real. Tw I 2022
Total Belanja APBD	5,118.96	520.04	10.16%	5,984.37	473.58	7.91%	5,524.88	822.98	14.90%	4,959.43	542.31	10.93%
Belanja Pegawai	978.86	189.02	19.31%	1,113.72	209.71	18.83%	1,083.36	188.60	17.41%	1,077.61	207.57	19.26%
Belanja Barang	1,259.77	179.99	14.29%	1,333.79	161.87	12.14%	1,339.45	166.81	12.45%	1,093.00	142.94	13.08%
Belanja Modal	1,227.61	70.67	5.76%	1,369.43	49.00	3.58%	1,331.36	324.05	24.34%	964.19	64.94	6.73%
Belanja Bantuan Sosial	5.78	0.65	11.25%	5.91	0.71	11.95%	3.18	-	0.00%	4.01	1.70	42.26%
Belanja Transfer	1,646.94	79.71	4.84%	2,161.53	52.29	2.42%	1,767.53	143.52	8.12%	1,820.61	125.17	6.88%

Sumber: Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat, diolah

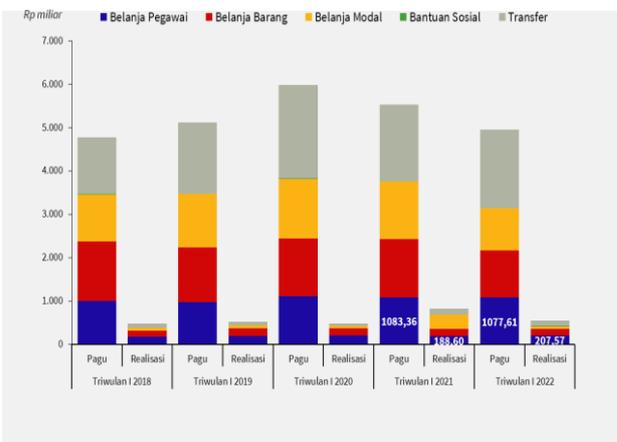
Realisasi belanja APBN Sulawesi Barat pada triwulan I 2022 didominasi oleh belanja pegawai. Komponen belanja pegawai APBN di Sulawesi Barat pada triwulan pelaporan telah direalisasikan sebesar Rp207.57 miliar, atau sekitar 38,28% dari total realisasi belanja APBN. Pada triwulan I 2022, realisasi jenis belanja yang diperuntukan untuk gaji pegawai. Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Barat tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 sebesar Rp188,6 miliar. Peningkatan belanja pegawai APBN di Sulawesi Barat didorong oleh adanya kebutuhan pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian, belanja barang menjadi komponen belanja APBN terbesar kedua dengan nominal realisasi sekitar Rp142,94 miliar dengan porsi sekitar 26,36% dari total realisasi belanja APBN. Meski demikian, nominal realisasi belanja tersebut tercatat lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sebesar Rp166,81 miliar. Hal ini dikarenakan adanya normalisasi penggunaan anggaran belanja barang dibandingkan kondisi diawal tahun lalu untuk pengadaan barang yang rusak pasca gempa. Realisasi belanja pegawai maupun belanja barang APBN Sulawesi Barat turut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Sulawesi Barat, tercermin dari kenaikan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan pelaporan.

Naiknya persentase realisasi belanja pegawai dan belanja barang belum mampu memberikan peningkatan persentase belanja terhadap pagu APBN Sulawesi Barat. Pada triwulan I 2022, persentase belanja pegawai tercatat sebesar 19,26%. Atau naik sebanyak 1,26 poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, peningkatan juga terjadi pada jenis belanja barang. Komponen belanja yang diperuntukan untuk kebutuhan pengadaan barang meningkat terbatas dari sebelumnya 12,45% menjadi 13,08% pada triwulan pelaporan. Untuk komponen belanja bantuan sosial, persentase belanja untuk bantuan sosial yang disalurkan oleh masyarakat tersebut terpantau meningkat signifikan. Hal ini didorong oleh adanya pencarian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada rentang periode Februari-Maret 2022. Meski demikian peningkatan persentase

yang signifikan tersebut belum mampu menaikkan persentase total belanja disebabkan nominal anggaran yang tidak sebesar komponen belanja lainnya.

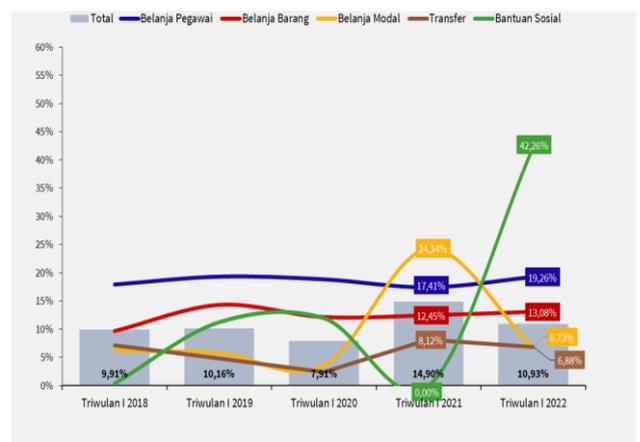
Adapun komponen belanja yang menyebabkan penurunan persentase total belanja terhadap pagu APBN Sulawesi Barat adalah belanja modal seiring dengan pembangunan pasca gempa yang mulai berakhir. Pada triwulan I 2022, realisasi belanja modal pada tercatat sebesar Rp64,94 miliar atau turun sebanyak Rp259,11 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini turut membuat persentase belanja modal mengalami penurunan menjadi 6,73% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 24,34% dari total pagu. Penurunan nominal maupun persentase tersebut disebabkan adanya normalisasi penggunaan anggaran setelah pada triwulan I 2021 terdapat peningkatan yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan pasca gempa (Grafik 3.1).

Grafik 3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN Sulawesi Barat



Sumber: Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat, diolah

Grafik 3.2. Realisasi APBN Sulawesi Barat



3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pagu pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan di tahun 2022, pagu pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berjalan tercatat sebesar Rp1,83 triliun, atau turun sekitar 10,8% (yoy). Penurunan terbesar terjadi pada komponen pendapatan transfer pusat ke daerah, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada tahun 2022, pagu DAK Non Fisik Sulawesi Barat tercatat sebesar Rp187.76 miliar, atau menurun signifikan sekitar 52,8% (yoy) (Tabel 2.2). Penurunan ini disebabkan adanya peralihan mekanisme penyaluran Dana BOS dari sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi berubah menjadi disalurkan langsung ke Satuan Pendidikan di tingkat kabupaten. Adanya kebijakan peralihan penyaluran tersebut bertujuan untuk mengurangi keterlambatan penyaluran DAK Non Fisik dari pusat ke daerah, terutama untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pendapatan Daerah Sulawesi Barat Triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp409,69 miliar, didominasi oleh pendapatan transfer Pemprov Sulawesi Barat

mencapai Rp347,1 miliar atau sekitar 84,7% dari total pendapatan daerah (Tabel 3.2). Porsi pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan I 2021, yakni sekitar 98,3%. Meski secara persentase lebih rendah, nominal pendapatan transfer Sulawesi Barat pada triwulan pelaporan lebih besar dibandingkan triwulan I 2021. Di sisi lain, penurunan porsi pendapatan transfer pada triwulan pelaporan juga dikarenakan adanya kenaikan penerimaan pajak Asli Daerah sehingga membuat total pendapatan daerah Sulawesi Barat menjadi lebih tinggi pada triwulan pelaporan.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Sulawesi Barat (Rp juta)

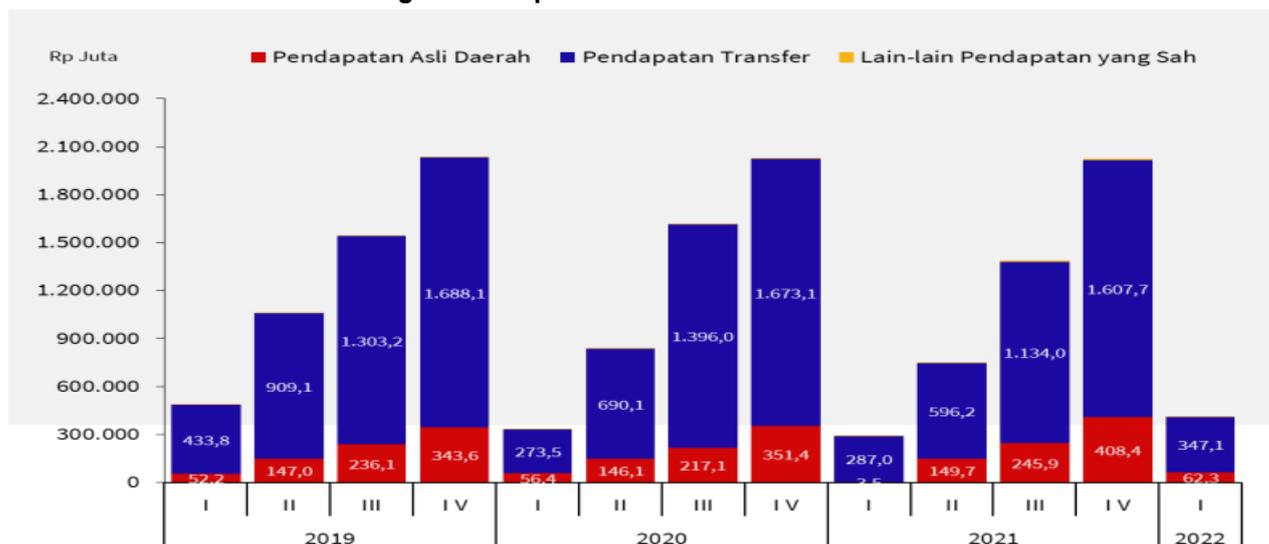
Uraian	Anggaran 2019	Tw I 2019	Anggaran 2020	Tw I 2020	Anggaran 2021	Tw I 2021	% Realisasi Tw I 2021	Anggaran 2022	Tw I 2022	% Realisasi Tw I 2022
Pendapatan	2,104,832.04	486,247.94	1,987,110.78	329,920.87	2,015,618.37	292,032.84	14.49%	1,827,077.44	409,689.49	22.42%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	370,109.98	52,209.95	299,149.75	56,378.77	386,506.90	3,451.36	0.89%	401,921.43	62,301.49	15.50%
Pajak Daerah	295,359.86	45,227.47	246,819.62	52,123.34	309,089.66	1,243.21	0.40%	337,294.87	54,047.46	16.02%
Retribusi Daerah	44,937.60	4,017.84	1,112.20	162.37	3,744.00	35.78	0.96%	3,742.00	223.30	5.97%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	16,175.00	0.00	12,867.25	0.00	12,867.25	0.00	0.00%	12,867.25	0.00	0.00%
Lain - lain PAD yang Sah	13,637.52	2,964.64	38,350.68	4,093.07	60,806.00	2,172.36	3.57%	48,017.31	8,030.73	16.72%
Pendapatan Transfer	1,732,910.64	433,805.74	1,683,000.15	273,453.73	1,627,249.04	286,999.04	17.64%	1,423,814.01	347,097.29	24.38%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,732,910.64	433,805.74	1,676,693.63	273,453.73	1,627,249.04	286,999.04	17.64%	1,423,814.01	347,097.29	24.38%
Bagi Hasil Pajak	18,086.88	2,377.15	16,354.61	0.00	14,927.58	4,841.92	32.44%	15,012.25	19.24	0.13%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,467.77	771.53	151.53	13.72	0.00	0.00	-	112.61	0.00	0.00%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,064,068.73	354,689.56	970,566.68	269,251.68	970,916.87	250,760.40	25.83%	972,189.18	322,518.91	33.17%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	613,203.10	75,967.49	681,203.58	0.00	227,523.56	0.00	0.00%	247,253.99	0.00	0.00%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			0.00	4,188.33	397,439.37	31,396.72	7.90%	187,762.40	23,817.36	12.68%
Dana Insentif Daerah (DID)	36,084.16	0.00	8,417.25	0.00	16,441.66	0.00	0.00%	1,483.58	741.79	50.00%
Bantuan Keuangan	0.00	0.00	6,306.52	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,811.43	232.25	4,960.88	88.38	1,862.43	1,582.44	84.97%	1,342.00	290.71	21.66%
Pendapatan Hibah	1,811.43		3,960.88	0.00	1,862.43	1,582.44	84.97%	1,342.00	290.71	21.66%
Pendapatan Dana Darurat	0.00	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Pendapatan Lainnya	0.00		1,000.00	88.38	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Walaupun pagu pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan tetapi kinerja fiskal pemerintah daerah dari sisi pendapatan terpantau meningkat pada triwulan I 2022. Realisasi pendapatan pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp409,7 miliar atau 22,42% dari target pendapatan tahun 2022 yang senilai Rp1,82 Triliun. Realisasi ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang terealisasi sebesar Rp292 miliar atau 14,49% dari targetnya. Peningkatan pendapatan ini terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat sangat signifikan di Triwulan I 2021 dari 3,45 miliar menjadi 62,3 miliar pada triwulan I 2022. Peningkatan PAD Sulawesi Barat pada triwulan berjalan didorong oleh aktivitas pemerintahan dan dunia usaha yang kembali berjalan normal dibandingkan kondisi pada periode awal tahun lalu yang terdampak bencana gempa bumi. Kondisi ini turut tercermin dari komponen PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang terpantau tumbuh positif pada triwulan pelaporan. Selain itu, realisasi pendapatan transfer juga meningkat yang sebelumnya di triwulan I 2021 dari Rp286,99 miliar menjadi

347,09 miliar pada triwulan I 2022. Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi pada komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Jenis pendapatan ini mengalami penurunan dari triwulan I 2021 sebesar Rp1,6 miliar menjadi Rp0,3 miliar pada triwulan pelaporan (Grafik 3.3).

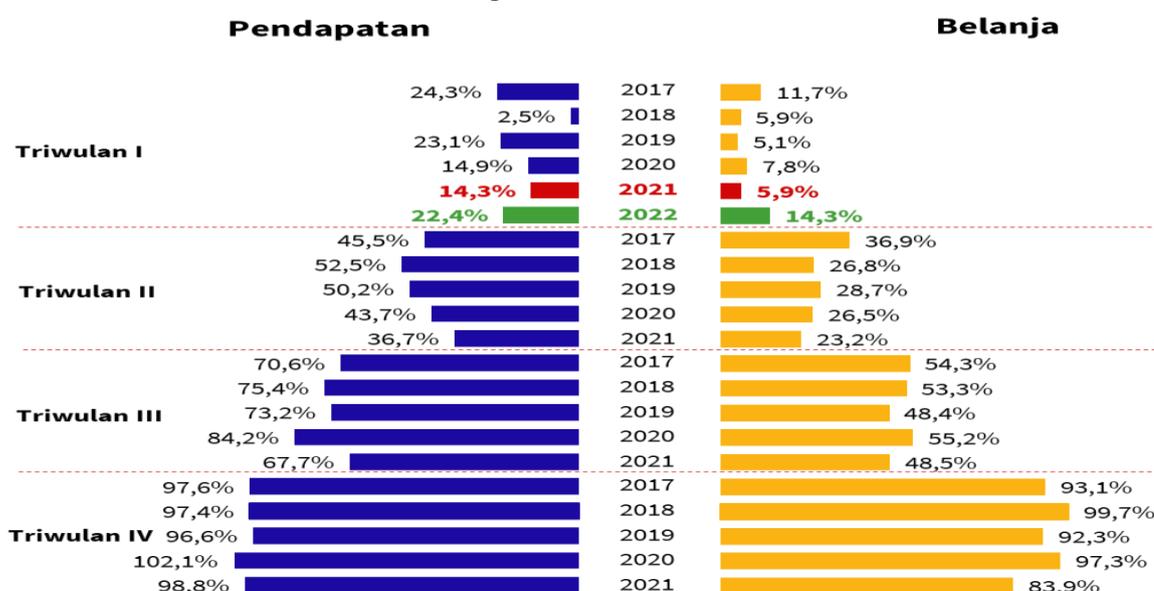
Grafik 3.3.
Perkembangan Pendapatan Pemerintah Prov. Sulawesi Barat



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Sejalan dengan pendapatan, belanja APBD Sulawesi Barat mengalami peningkatan pada triwulan I 2022. Realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan pelaporan tercatat sebesar Rp311,12 miliar atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 sebesar Rp139,17 miliar. Ditinjau dari persentase realisasinya, belanja APBD Sulawesi Barat terealisasi sekitar 14,31% dari pagu belanja 2022. Angka persentase ini juga lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sekitar 5,89% (Grafik 3.4). Meningkatnya belanja APBD, baik nominal maupun persentase didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal dan belanja operasi. Untuk belanja modal, kenaikan belanja ini dikontribusikan oleh komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Hal ini terkonfirmasi dan beberapa proyek infrastruktur yang masih terus dikerjakan, diantaranya Jalan Trans Sulawesi, Jalan Poros Matangnga Keppe, dan jalan akses menuju Pelabuhan Budong-Budong dan Pelabuhan Pasangkayu. Sementara untuk belanja operasi, kenaikan komponen belanja ini dikontribusikan oleh belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.

Grafik 3.4.
Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Pagu belanja APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terpantau menurun dibandingkan tahun 2021. Alokasi pagu belanja daerah Pemprov Sulawesi Barat tercatat sebesar Rp2,17 triliun, atau menurun sekitar 7,92% (yoy). Penurunan terbesar berada pada alokasi belanja operasi dan belanja modal. Untuk belanja operasi, pagu belanja hibah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar Rp254,6 miliar menjadi Rp62,2 miliar pada tahun 2021, atau turun sekitar 75,56% (yoy). Selanjutnya, alokasi belanja modal pada tahun berjalan juga terpantau menurun menjadi Rp567,1 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp679,2 miliar (Tabel 3.3). Adapun komponen yang berkontribusi terhadap penurunan belanja modal adalah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal peralatan dan mesin. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2021 karena adanya kebutuhan pembangunan pascagempa.

Ditengah penurunan pagu, realisasi belanja APBD Sulawesi Barat meningkat pada triwulan I 2022. Realisasi belanja daerah Pemprov Sulawesi Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp311,1 miliar, atau naik sekitar 123,56% (yoy). Kenaikan belanja daerah Sulawesi Barat dikontribusikan utama oleh belanja modal, kemudian disusul belanja operasi. Untuk belanja modal, komponen belanja yang diorientasikan pada pembangunan infrastruktur tersebut meningkat di tengah penurunan pagu anggaran tersebut. Pada triwulan I 2022, realisasi belanja modal Sulawesi Barat tercatat sebesar Rp113,5 miliar, atau naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp14,3 miliar. Capaian ini didorong oleh adanya pembangunan infrastruktur daerah di beberapa wilayah Sulawesi Barat dibandingkan pada periode awal tahun lalu di mana aktivitas pemerintahan tidak

berjalan normal pascagempa. Sejalan dengan belanja modal, realisasi belanja operasi pada triwulan pelaporan juga mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2022, realisasi belanja yang didominasi oleh kebutuhan operasional pemerintah tersebut tercatat sebesar Rp153,4 miliar, atau naik sekitar 63,51% (yoy). Adapun yang menjadi kontributor utama naiknya komponen belanja operasi pada triwulan pelaporan adalah belanja barang dan jasa. Realisasi jenis belanja ini pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp58,6 miliar, atau meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp11,2 miliar. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan belanja barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan operasional pemerintahan. Selanjutnya, peningkatan juga terjadi pada belanja pegawai. Komponen belanja ini pada triwulan pelaporan tercatat sebesar Rp86,9 miliar, atau naik sekitar 19,16% (yoy). Faktor pendorong naiknya belanja pegawai adalah adanya kebutuhan pembayaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, belanja transfer Provinsi Sulawesi Barat meningkat pada triwulan I 2022. Realisasi belanja transfer Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan pelaporan tercatat sebesar Rp44,2 miliar, atau naik sekitar 46,67% (yoy). Peningkatan jenis belanja ini utamanya dikontribusikan oleh transfer bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Desa. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan pendapatan pajak daerah, salah satunya adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan meningkatnya penerimaan BBNKB Sulawesi Barat akan menaikkan bagian pemerintah kabupaten atas perolehan jenis pajak daerah tersebut.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Sulawesi Barat (Rp juta)

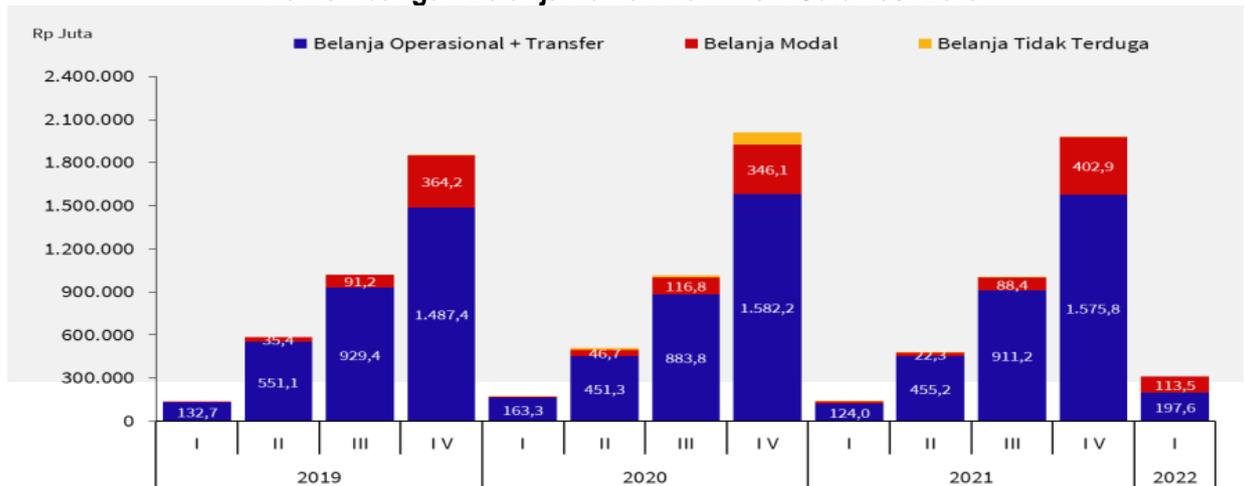
Uraian	Anggaran 2019	Tw I 2019	Anggaran 2020	Tw I 2020	Anggaran 2021	Tw I 2021	% Realisasi Tw I 2021	Anggaran 2022	Tw I 2022	% Realisasi Tw I 2022
BELANJA + TRANSFER	1,926,781.99	98,564.98	2,068,442.01	173,155.57	2,361,848.73	139,166.50	5.89%	2,174,838.49	311,117.69	14.31%
BELANJA OPERASI	1,505,348.93	98,440.17	1,400,144.65	163,286.90	1,505,262.66	93,800.69	6.23%	1,362,440.31	153,370.64	11.26%
Belanja Pegawai	612,368.62	60,599.35	531,392.38	93,691.44	572,914.44	78,984.54	13.79%	682,684.72	86,866.79	12.72%
Belanja Barang dan Jasa	538,271.31	32,657.84	552,795.33	29,519.31	656,544.51	11,225.00	1.71%	595,449.76	58,565.01	9.84%
Belanja Bunga	19,154.08	5,182.98	7,815.74	4,031.21	18,712.35	3,591.15	19.19%	20,696.30	3,335.55	16.12%
Belanja Hibah	262,750.92	0.00	305,574.75	2,459.02	254,561.36	0.00	0.00%	62,219.53	4,603.29	7.40%
Belanja Bantuan Sosial	72,804.00	0.00	2,566.44	0.00	2,530.00	0.00	0.00%	1,390.00	0.00	0.00%
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemdes		0.00	0.00	33,585.91	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemdes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
BELANJA MODAL	417,433.06	124.82	364,204.67	7,873.06	679,161.33	14,275.28	2.10%	567,064.70	113,518.35	20.02%
Belanja Modal Tanah	31,197.08	0.00	15,286.89	4,881.39	17,972.29	0.00	0.00%	18,135.60	1,999.85	11.03%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122,947.29	62.69	114,676.01	2,981.33	96,922.43	0.00	0.00%	71,640.17	0.00	0.00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123,109.13	5.40	114,537.28	5.22	134,686.91	10,859.45	8.06%	127,078.76	0.00	0.00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	118,786.37	56.73	83,835.00	5.12	375,520.44	3,415.83	0.91%	323,380.43	111,518.50	34.49%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19,600.77	0.00	35,869.49	0.00	54,059.26	0.00	0.00%	26,829.73	0.00	0.00%
Belanja Modal Aset Lainnya	1,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
BELANJA TAK TERDUGA	4,000.00		87,415.84	1,995.62	5,792.35	936.02	16.16%	10,785.30	0.00	0.00%
Belanja Tak Terduga	4,000.00	0.00	87,415.84	1,995.62	5,792.35	936.02	16.16%	10,785.30	0.00	0.00%
BELANJA TRANSFER	149,939.97	34,239.05	216,676.86	0.00	171,632.40	30,154.51	17.57%	234,548.19	44,228.70	18.86%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	149,939.97	34,239.05	157,607.84	0.00	161,832.40	30,154.51	18.63%	186,648.19	44,228.70	23.70%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	149,939.97	34,239.05	157,607.84	0.00	161,832.40	30,154.51	18.63%	186,648.19	44,228.70	23.70%
BANTUAN KEUANGAN	0.00	0.00	59,069.01	0.00	9,800.00	0.00	0.00%	47,900.00	0.00	0.00%
SURPLUS/DEFISIT	28,110.08	353,443.90	-87,637.75	152,509.87	-356,967.67	152,866.34	-42.82%	-347,761.05	98,571.81	-28.34%
PEMBIAYAAN										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30,650.37	0.00	135,362.77	0.00	403,192.70	0.00	0.00%	403,422.87	284,520.27	70.53%
SILPA Tahun Sebelumnya	30,650.37	0.00	97,892.86	0.00			-	174,869.56	149,520.27	85.50%
Penerimaan Pinjaman Daerah			37,469.91	0.00			-	228,553.31	135,000.00	59.07%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58,760.45	23,556.26	47,725.02	11,556.26	46,225.02	11,556.26	25.00%	55,661.82	12,846.26	23.08%
Penyertaan Modal Daerah	12,000.00	12,000.00	1,500.00	0.00			-	0.00	0.00	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			46,225.02	11,556.26		11,556.26	-	55,661.82	12,846.26	23.08%
PEMBIAYAAN NETTO	-28,110.08	-23,556.26	87,637.75	-11,556.26	356,967.67	-11,556.26	-3.24%	347,761.05	271,674.00	78.12%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERJALAN	0.00	329,887.65	0.00	140,953.61	0.00	141,310.09	-	0.00	370,245.81	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Ditinjau dari sisi persentase realisasi, belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat triwulan I 2022 mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya nominal belanja, persentase realisasi belanja APBD Sulawesi Barat pada triwulan I 2022 mencapai Rp311,1 miliar atau sekitar 14,31% dari total pagu. Capaian persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya hanya sekitar 5,89% dari total pagu tahun 2021. Jika dirinci lebih lanjut, kenaikan persentase belanja APBD Sulawesi Barat dikontribusikan oleh komponen belanja modal dan belanja operasi. Untuk belanja modal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat cukup progresif pada triwulan pelaporan dengan capaian realisasi sebesar Rp113,5 miliar, atau sekitar 20,02% dari total pagu. Persentase jenis belanja tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan I 2021 yang hanya sekitar 2,1% dari total pagu tahun 2021. Selanjutnya, persentase belanja operasi juga mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 6,23% menjadi 11,26% dari total masing-masing pagu. Meningkatnya persentase realisasi belanja

APBD Sulawesi Barat sejalan dengan tumbuhan PDRB Pengeluaran Pemerintah pada triwulan pelaporan. Kondisi ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di level positif (Grafik 3.5).

Grafik 3.5.
Perkembangan Belanja Pemerintah Prov. Sulawesi Barat



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

3.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp409.689.493.715,00 atau 22,42% dari target yang direncanakan sebesar Rp1.827.077.436.435,00. Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp347.097.290.722,00 atau 24,38% sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp379.393.015.259,00 atau 22,86%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp290.708.900,00 atau 21,66% sedangkan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.582.543.000,00 atau 84,97%. Adapun realisasi pendapatan triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Pendapatan Triwulan I Tahun Anggaran 2022

URAIAN	PENDAPATAN 2022			KET
	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I		
		Rp	%	
PENDAPATAN DAERAH	1.827.077.436.435,00	409.689.493.715,00	22,42	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	401.921.428.435,00	62.301.494.093,00	15,50	
Pendapatan Pajak Daerah	337.294.866.304,00	54.047.463.239,00	16,02	
Pendapatan Retribusi Daerah	3.742.000.000,00	223.302.700,00	5,97	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.867.247.793,00	0,00	0,00	
Lain-lain PAD Yang Sah	48.017.314.338,00	8.030.728.154,00	16,72	
PENDAPATAN TRANSFER	1.423.814.008.000,00	347.097.290.722,00	24,38	
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat	1.423.814.008.000,00	347.097.290.722,00	24,38	
Dana Perimbangan	1.610.807.373.000,00	346.355.501.722,00	21,50	
Dana Transfer Umum	987.314.043.000,00	322.538.145.662,00	32,66	
DBH	15.124.863.000,00	19.235.400,00	0,12	
DAU	972.189.180.000,00	322.518.910.262,00	33,17	
Dana Transfer Khusus	435.016.386.000,00	23.817.356.060,00	5,47	
DAK Fisik	247.253.991.000,00	-	-	
DAK Non Fisik	187.762.395.000,00	23.817.356.060,00	12,68	
Dana Insentif Daerah	1.483.579.000,00	741.789.000,00	50,00	
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.342.000.000,00	290.708.900,00	21,66	
Pendapatan Hibah	1.342.000.000,00	-	-	
Dana Darurat	-	-	-	
Pendapatan Lainnya	0,00	290.708.900,00	-	

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat

3.2.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Provinsi Sulawesi Barat

Pagu Belanja Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.361.848.733.892,00 dan Realisasi sebesar Rp.1.236.610.814.595,24 atau 52,36 persen. Dapat dijelaskan bahwa realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 per triwulan I sebesar Rp153,370,636,492.00 dari pagu anggaran sebesar Rp1,362,440,305,236.00 atau 11,26 persen. Sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp113,518,345,789.00 atau 20,02 persen dari pagu sebesar Rp567,064,695,862.00, begitu pula dengan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10,785,298,144.00 belum ada yang terealisasi, sedangkan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp44,228,704,056.00 atau 18,86 persen dari pagu Rp234,548,188,996.00. Adapun realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 Triwulan I dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan I T.A 2022
Provinsi Sulawesi Barat

URAIAN	Belanja Daerah 2022			KET
	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I		
		Rp	%	
BELANJA	2,174,838,488,238.00	311,117,686,337.00	14.31	
BELANJA OPERASI	1,362,440,305,236.00	153,370,636,492.00	11.26	
Belanja Pegawai	682,684,715,838.00	86,866,794,878.00	12.72	
Belanja Barang dan Jasa	595,449,763,284.00	58,565,008,765.00	9.84	
Belanja Bunga	20,696,296,514.00	3,335,547,849.00	16.12	
Belanja Hibah	62,219,529,600.00	4,603,285,000.00	7.40	
Belanja Bantuan Sosial	1,390,000,000.00	-	-	
BELANJA MODAL	567,064,695,862.00	113,518,345,789.00	20.02	
BELANJA TIDAK TERDUGA	10,785,298,144.00	-	-	
BELANJA TRANSFER	234,548,188,996.00	44,228,704,056.00	18.86	
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten	186,648,188,996.00	44,228,704,056.00	23.70	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten	33,700,000,000.00	-	-	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	14,200,000,000.00	-	-	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat

3.2.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 per triwulan I sebesar Rp271,674,002,809.14 atau 78,12 persen dari pagu sebesar Rp347,761,051,803.00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 per triwulan I sebesar Rp284.520.267.107,14 atau 70,53 persen dari pagu sebesar Rp403.422.872.493,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 per triwulan I sebesar Rp12.846.264.298,00 atau 23,08 persen dari pagu sebesar Rp55.661.820.690,00. Adapun realisasi Pembiayaan Daerah triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Triwulan I T.A 2022
Provinsi Sulawesi Barat

URAIAN	APBD 2022			KET
	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW I		
		Rp	%	
SURPLUS / DEFISIT	-347,761,051,803.00	98,571,807,378.00	-28,34	
PEMBIAYAAN NETTO	347,761,051,803.00	271,674,002,809.14	78.12	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	403,422,872,493.00	284,520,267,107.14	70.53	
Penggunaan SiLPA	174,869,558,991.00	149,520,267,107.14	85.50	
Pinjaman Daerah	228,553,313,502.00	135,000,000,000.00	59.07	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55,661,820,690.00	12,846,264,298.00	23.08	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55,661,820,690.00	12,846,264,298.00	23.08	

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih

merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil

Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian Barang Milik Daerah dan pendapatan usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana insentif daerah;

b. Transfer antar daerah

Transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah

pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Melakukan penyesuaian regulasi di bidang pendapatan akibat terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak.
3. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan optimalisasi samsat Online dan samsat keliling serta inovasi peningkatan pajak daerah.
4. Melakukan pendataan dan pengawasan wajib pajak.
5. Perkuatan struktur permodalan BUMD untuk peningkatan deviden.
6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Bea Cukai.
7. Mengkaji ulang regulasi yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pungutan terkhusus untuk penerimaan sumbangan pihak ketiga.
8. Peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021 dan target tahun 2022 maka komposisi pendapatan daerah tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

8.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dipandang sebagai salah satu kriteria untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena sebagai sumber pendapatan yang murni berasal dari daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

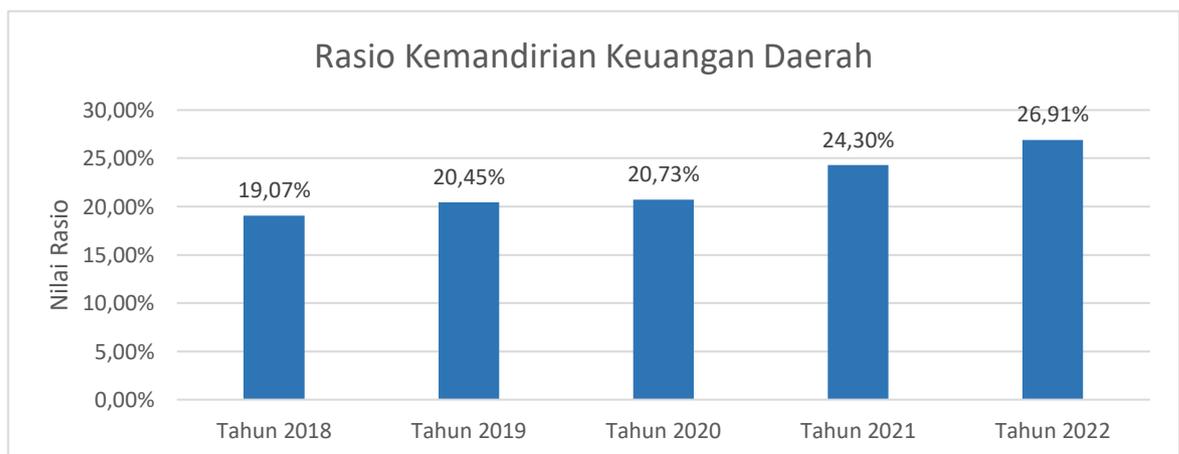
Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi semakin rendah. Berikut digambarkan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 4.1
Alokasi PAD, Dana Trasfer dan Rasio Kemandirian Keuangan
Tahun 2018 – 2022

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TRANSFER PUSAT DAN PINJAMAN	RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	KETERANGAN
2018	301.428.960.453,22	1.580.985.893.525,00	19,07%	Sangat Rendah
2019	345.208.054.041,74	1.688.130.947.611,00	20,45%	Sangat Rendah
2020	346.864.756.506,15	1.672.948.374.262,00	20,73%	Sangat Rendah
2021	408.407.276.578,59	1.680.924.196.440,00	24,30%	Sangat Rendah
2022	401.921.428.435,00	1.493.359.600.529,00	26,91%	Rendah

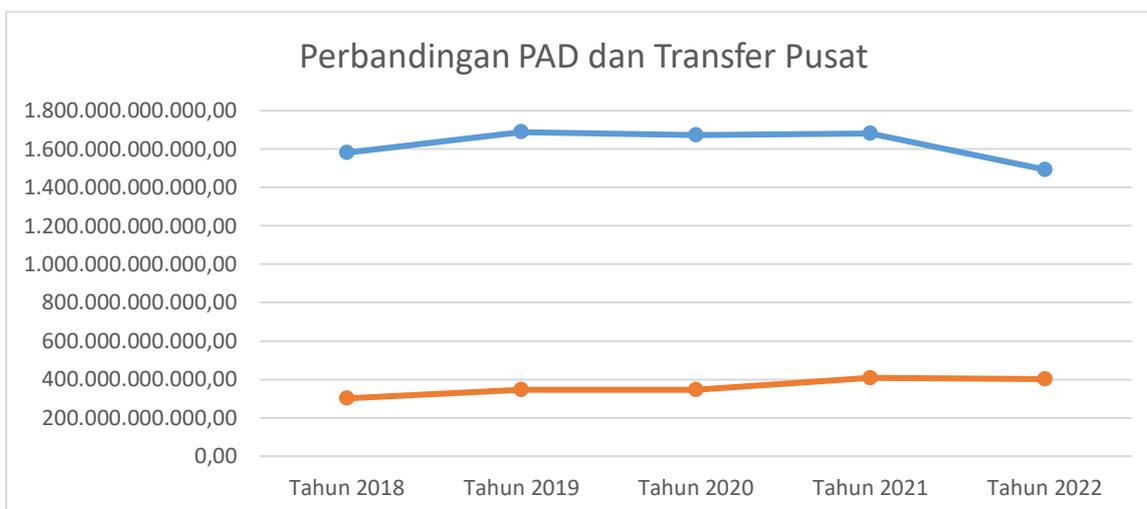
Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

Grafik 4.1
Rasio Kemandirian Keuangan
Tahun 2018-2022



Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

Grafik 4.2
Perbandingan PAD terhadap Dana Transfer Pusat
Tahun 2018-2022



Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih sangat tergantung dari pendanaan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian daerah selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata masih “kurang” berkisar pada angka 19-27% (Kategori rendah dan sangat rendah). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri masih kurang. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih menyikapi kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan penerimaan Daerah maka mampu memberikan efek signifikan terhadap kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp369.909.052.993,00 terealisasi sebesar Rp407.996.514.740,59 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp401.921.428.435,00 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp428.340.254.015,00 atau meningkat sebesar 6,57% dibanding target tahun 2022.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Daerah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp315.422.572.121,00 terealisasi sebesar Rp346.226.491.571,00 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp337.294.866.304,00 maka Pajak Daerah Tahun

2023 diproyeksikan sebesar Rp351.188.245.375,00 atau meningkat sebesar 4,12% dibanding target tahun 2022.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.263.234.500,00 terealisasi sebesar Rp2.923.826.300,00 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp3.742.000.000,00 maka Retribusi Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.917.680.000,00 atau meningkat sebesar 4,69% dibanding target tahun 2022.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp12.867.247.793,00 terealisasi sebesar Rp12.599.189.840,00 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp12.867.247.793,00 maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp13.510.610.182,00 atau meningkat sebesar 5,00% dibanding target tahun 2022.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp38.355.998.579,00 terealisasi sebesar Rp46.657.768.867,59 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp48.017.314.338,00 maka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp59.723.718.458,00 atau meningkat sebesar 24,38% dibanding target tahun 2022.

8.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.629.249.037.000,00 terealisasi sebesar Rp1.607.670.578.711,40 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp1.423.814.008.000,00 maka Pendapatan transfer Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.498.210.315.640,00 atau meningkat sebesar 5,23% dibanding target tahun 2022. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan dari transfer pemerintah pusat tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.627.249.037.000,00 terealisasi sebesar Rp1.609.482.634.440,00 sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp1.423.814.008.000,00 maka Pendapatan dari transfer pemerintah pusat tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.498.210.315.640,00 atau meningkat sebesar 5,23% dibanding target tahun 2022, yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.496.711.900.850,00 meliputi :

a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.057.345.350.990,00 meliputi :

- 1) Dana Bagi Hasil sebesar Rp15.276.111.630,00
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.042.069.239.360,00
- b) Dana Transfer Khusus (DAK) sebesar Rp439.366.549.860,00 meliputi:
 - 1) DAK Fisik sebesar Rp249.726.530.910,00
 - 2) DAK Non Fisik sebesar Rp189.640.018.950,00
- b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.498.414.790,00

8.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp5.722.969.912,00 terealisasi sebesar Rp7.191.926.605,82 sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp1.342.000.000,00 maka Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.092.000.000,00 atau berkurang sebesar 18,63% dibanding target tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.004.881.059.905,00 terealisasi sebesar Rp2.024.671.075.786,41 sedangkan target tahun 2022 sebesar Rp1.827.077.436.435,00 maka total Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.927.642.569.655,00 atau bertambah sebesar 5,50% dibanding target tahun 2022, sebagaimana tergambar pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD 2021	Realisasi APBD 2021	Target APBD 2022	RAPBD 2023 (KUA-PPAS)	Selisih APBD 2022 dan RAPBD 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.004.881.059.905,00	2.024.671.075.786,41	1.827.077.436.435,00	1.927.642.569.655,00	100.565.133.220,00	5,50%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	369.909.052.993,00	407.996.514.740,59	401.921.428.435,00	428.340.254.015,00	26.418.825.580,00	6,57%
	Pajak Daerah	315.422.572.121,00	346.226.491.571,00	337.294.866.304,00	351.188.245.375,00	13.893.379.071,00	4,12%
	Retribusi Daerah	3.263.234.500,00	2.923.826.300,00	3.742.000.000,00	3.917.680.000,00	175.680.000,00	4,69%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.867.247.793,00	12.599.189.840,00	12.867.247.793,00	13.510.610.182,00	643.362.389,00	5,00%
	Lain-lain PAD Yang Sah	38.355.998.579,00	46.247.007.029,59	48.017.314.338,00	59.723.718.458,00	11.706.404.120,00	24,38%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.629.249.037.000,00	1.609.482.634.440,00	1.423.814.008.000,00	1.498.210.315.640,00	74.396.307.640,00	5,23%
	Transfer Pemerintah Pusat	1.627.249.037.000,00	1.609.482.634.440,00	1.423.814.008.000,00	1.498.210.315.640,00	74.396.307.640,00	5,23%
	-Dana Perimbangan	1.610.807.373.000,00	1.593.040.970.440,00	1.422.330.429.000,00	1.496.711.900.850,00	74.381.471.850,00	5,23%
	Dana Transfer Umum	985.844.449.000,00	993.972.284.591,00	987.314.043.000,00	1.057.345.350.990,00	70.031.307.990,00	7,09%
	DBH	14.927.575.000,00	23.055.410.591,00	15.124.863.000,00	15.276.111.630,00	151.248.630,00	1,00%
	DAU	970.916.874.000,00	970.916.874.000,00	972.189.180.000,00	1.042.069.239.360,00	69.880.059.360,00	7,19%
	Dana Transfer Khusus	624.962.924.000,00	599.068.685.849,00	435.016.386.000,00	439.366.549.860,00	4.350.163.860,00	1,00%
	DAK Fisik	227.523.558.000,00	209.025.058.547,00	247.253.991.000,00	249.726.530.910,00	2.472.539.910,00	1,00%
	DAK Non Fisik	397.439.366.000,00	390.043.627.302,00	187.762.395.000,00	189.640.018.950,00	1.877.623.950,00	1,00%
	-Dana Insentif Daerah	16.441.664.000,00	16.441.664.000,00	1.483.579.000,00	1.498.414.790,00	14.835.790,00	1,00%
	Transfer Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	-	-	-	-	0,00%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.722.969.912,00	7.191.926.605,82	1.342.000.000,00	1.092.000.000,00	-250.000.000,00	-18,63%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya	-	2.156.946.434,00	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Hibah dari badan/ Lembaga/Organisasi Swasta	5.191.874.509,00	4.045.591.771,82	1.342.000.000,00	744.600.000,00	-597.400.000,00	-44,52%
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	531.095.403,00	-	-	347.400.000,00	347.400.000,00	0,00%
	Sumbangan Pihak ketiga/Sejenis	-	962.755.400,00	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Hibah Dana Bos	-	26.633.000,00	-	-	-	0,00%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, (data diolah)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan struktur belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 maka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada dokumen tersebut. Selanjutnya, pandemi *Covid-19* sejak semester pertama tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini, sehingga kebijakan belanja pada tahun 2023 selain diarahkan pada pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 juga untuk melaksanakan

pemulihan ekonomi dan pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”**, maka pembangunan tahun 2023 diprioritaskan untuk:

1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah.
2. Meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, pemenuhan SPM dan membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Memenuhi belanja yang terkait dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
4. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2021 dan target belanja daerah pada tahun 2022, maka perkiraan belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp1.897.194.399.556,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.265.874.933.510,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai Rp671.128.648.181,00;
 - b. Belanja barang dan jasa Rp622.097.208.778;

- c. Belanja bunga Rp16.821.064.820,00;
 - d. Belanja hibah Rp45.718.427.500,00; dan
 - e. Belanja bantuan sosial Rp7.100.500.000,00.
- 2. Belanja Modal sebesar Rp320.383.108.517;
 - 3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.324.563.051,00;
 - 4. Belanja Transfer sebesar Rp202.620.878.709,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja bagi hasil Rp194.220.878.709,00; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan Rp8.400.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan rancangan belanja daerah tahun 2023 yang tercantum pada tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD 2021	Realisasi APBD 2021	APBD 2022	RAPBD 2023 (KUA-PPAS)	Selisih APBD 2022 dan Rencana 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	BELANJA DAERAH	2.361.848.733.892,00	1.986.339.100.172,19	2.015.662.940.595,00	1.897.194.399.556,00	-118.468.541.039,00	-5,88%
1	BELANJA OPERASI	1.505.262.658.342,00	1.410.391.991.232,77	1.362.393.489.236,00	1.362.865.849.279,00	472.360.043,00	0,03%
	Belanja Pegawai	572.914.435.099,00	563.347.419.213,13	682.684.715.838,00	671.128.648.181,00	-11.556.067.657,00	-1,69%
	Belanja Barang dan Jasa	656.544.514.834,00	580.768.512.777,64	595.402.947.284,00	622.097.208.778,00	26.694.261.494,00	4,48%
	Belanja Bunga	18.712.345.075,00	13.414.036.710,00	20.696.296.514,00	16.821.064.820,00	-3.875.231.694,00	-18,72%
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
	Belanja Hibah	254.561.363.334,00	250.372.022.532,00	62.219.529.600,00	45.718.427.500,00	-16.501.102.100,00	-26,52%
	Belanja Bantuan Sosial	2.530.000.000,00	2.490.000.000,00	1.390.000.000,00	7.100.500.000,00	5.710.500.000,00	410,83%
2	BELANJA MODAL	679.161.325.008,00	402.867.597.767,42	407.935.964.219,00	320.383.108.517,00	-87.552.855.702,00	-21,46%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.792.348.238,00	2.647.108.868,00	10.785.298.144,00	11.324.563.051,00	539.264.907,00	5,00%
	Belanja Tidak Terduga	5.347.698.238,00	2.647.108.868,00	10.785.298.144,00	11.324.563.051,00	539.264.907,00	5,00%
	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Terencana	444.650.000,00	-	-	-	-	0,00%
4	BELANJA TRANSFER	171.632.402.304,00	170.432.402.304,00	234.548.188.996,00	202.620.878.709,00	-31.927.310.287,00	-13,61%
	Belanja Bagi Hasil	161.832.402.304,00	161.832.402.304,00	186.648.188.996,00	194.220.878.709,00	7.572.689.713,00	4,06%
	Belanja Bantuan Keuangan	9.800.000.000,00	8.600.000.000,00	47.900.000.000,00	8.400.000.000,00	-39.500.000.000,00	-82,46%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan pembentukan dana cadangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2023 belum direncanakan sebesar Rp82.106.257.130,00, yang berupa sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp82.106.257.130,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp112.554.427.229,00 yang terdiri dari Pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp62.554.427.229,00 dan pembentukan dana cadangan dalam rangka pembiayaan pilkada serentak 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan ringkasan struktur Rancangan APBD 2023 pada penyempurnaan dan penyesuaian KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2023 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7.1.
Ringkasan Rancangan Struktur APBD TA. 2023

NO	URAIAN	APBD 2022	RAPBD 2023 (KUA-PPAS)	SELISIH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PENDAPATAN DAERAH	1.827.077.436.435,00	1.927.642.569.655,00	100.565.133.220,00	5,50%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	401.921.428.435,00	428.340.254.015,00	26.418.825.580,00	6,57%
	Pajak Daerah	337.294.866.304,00	351.188.245.375,00	13.893.379.071,00	4,12%
	Retribusi Daerah	3.742.000.000,00	3.917.680.000,00	175.680.000,00	4,69%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.867.247.793,00	13.510.610.182,00	643.362.389,00	5,00%
	Lain-lain PAD Yang Sah	48.017.314.338,00	59.723.718.458,00	11.706.404.120,00	24,38%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.423.814.008.000,00	1.498.210.315.640,00	74.396.307.640,00	5,23%
	Transfer Pemerintah Pusat	1.423.814.008.000,00	1.498.210.315.640,00	74.396.307.640,00	5,23%
	-Dana Perimbangan	1.422.330.429.000,00	1.496.711.900.850,00	74.381.471.850,00	5,23%
	Dana Transfer Umum	987.314.043.000,00	1.057.345.350.990,00	70.031.307.990,00	7,09%
	DBH	15.124.863.000,00	15.276.111.630,00	151.248.630,00	1,00%
	DAU	972.189.180.000,00	1.042.069.239.360,00	69.880.059.360,00	7,19%
	Dana Transfer Khusus	435.016.386.000,00	439.366.549.860,00	4.350.163.860,00	1,00%
	DAK Fisik	247.253.991.000,00	249.726.530.910,00	2.472.539.910,00	1,00%
	DAK Non Fisik	187.762.395.000,00	189.640.018.950,00	1.877.623.950,00	1,00%
	-Dana Insentif Daerah	1.483.579.000,00	1.498.414.790,00	14.835.790,00	1,00%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.342.000.000,00	1.092.000.000,00	-250.000.000,00	-18,63%
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Hibah dari badan/ Lembaga/Organisasi Swasta	1.342.000.000,00	1.092.000.000,00	-250.000.000,00	-18,63%
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	0,00%
	Sumbangan Pihak ketiga/Sejenis	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Hibah Dana Bos	-	-	-	0,00%
II	BELANJA DAERAH	2.015.662.940.595,00	1.897.194.399.556,00	118.468.541.039,00	-5,88%
1	BELANJA OPERASI	1.362.393.489.236,00	1.362.865.849.279,00	472.360.043,00	0,03%
	Belanja Pegawai	682.684.715.838,00	671.128.648.181,00	-11.556.067.657,00	-1,69%
	Belanja Barang dan Jasa	595.402.947.284,00	622.097.208.778,00	26.694.261.494,00	4,48%

NO	URAIAN	APBD 2022	RAPBD 2023 (KUA-PPAS)	SELISIH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Belanja Bunga	20.696.296.514,00	16.821.064.820,00	-3.875.231.694,00	-18,72%
	Belanja Hibah	62.219.529.600,00	45.718.427.500,00	-16.501.102.100,00	-26,52%
	Belanja Bantuan Sosial	1.390.000.000,00	7.100.500.000,00	5.710.500.000,00	410,83%
2	BELANJA MODAL	407.935.964.219,00	320.383.108.517,00	-87.552.855.702,00	-21,46%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.785.298.144,00	11.324.563.051,00	539.264.907,00	5,00%
	Belanja Tidak Terduga	10.785.298.144,00	11.324.563.051,00	539.264.907,00	5,00%
4	BELANJA TRANSFER	234.548.188.996,00	202.620.878.709,00	-31.927.310.287,00	-13,61%
	Belanja Bagi Hasil	186.648.188.996,00	194.220.878.709,00	7.572.689.713,00	4,06%
	Belanja Bantuan Keuangan	47.900.000.000,00	8.400.000.000,00	-39.500.000.000,00	-82,46%
	SURPLUS/DEFISIT	-188.585.504.160,00	30.448.170.099,00	219.033.674.259,00	
III	PEMBIAYAAN DAERAH	188.585.504.160,00	-30.448.170.099,00	219.033.674.259,00	116,15%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	244.247.324.850,00	82.106.257.130,00	162.141.067.720,00	-66,38%
	SILPA	174.701.732.321,00	82.106.257.130,00	-92.595.475.191,00	-53,00%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	69.545.592.529,00	-	-69.545.592.529,00	100,00%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.661.820.690,00	112.554.427.229,00	56.892.606.539,00	102,21%
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	55.661.820.690,00	62.554.427.229,00	6.892.606.539,00	12,38%
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00	0,00%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	188.585.504.160,00	-30.448.170.099,00	219.033.674.259,00	116,15%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	-	-	0,00%

Sumber data: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (data diolah)

1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Strategi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

a. Strategi Pencapaian Target PAD

- 1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan.
- 2) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan.
- 3) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- 5) Melakukan pemutakhiran data objek pajak.

- 6) Pemberian insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan mutasi untuk BBNKB II dari non DC ke DC yang menjadi potensi penerimaan PKB untuk tahun Berikutnya.
- 7) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, gerai Samsat, Samsat Keliling, pengembangan Samsat Payment Point dan beberapa inovasi lainnya.
- 8) Mendorong sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/Lembaga keuangan.
- 9) Optimalisasi penggunaan aset milik daerah untuk peningkatan pendapatan daerah misalnya optimalisasi layanan Laboratorium di beberapa OPD dan pembangunan rest area.
- 10)Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah.
- 11)Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkinerja maksimal.
- 12)Optimalisasi pengelolaan BLUD RSUD.

b. Strategi Optimalisasi Pendapatan Transfer

Strategi Optimalisasi Pendapatan Transfer adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi pencapaian kebijakan belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

- 1) Pengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- 2) Penganggaran Belanja barang dan jasa untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD.
- 3) Penganggaran belanja bunga untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Pengalokasian anggaran pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian belanja untuk membiayai pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Penggaran belanja transfer berupa pengeluaran uang kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah desa.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat, oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah pusat maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Mamuju, 2022

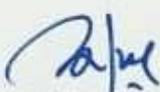


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**



USMAN SUHURIAH
Wakil Ketua

H. ABDUL HALIM
Wakil Ketua



H. ABDUL RAHIM, S.Ag. MH
Wakil Ketua